

Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan

Ir. Taryono, M.Si.



PENDAHULUAN

Ekonomi pembangunan menjadi hal yang penting sejak disadari adanya ketimpangan perkembangan ekonomi yang besar antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Analisis mengenai ekonomi pembangunan dilakukan setelah Perang Dunia II, di mana sebagian besar perhatian ekonom difokuskan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya ketimpangan-ketimpangan tersebut.

Dalam Mazhab Klasik, pemikiran dan telaahan tentang ekonomi pada umumnya didasarkan pada kondisi ruang dan waktu di negara-negara yang memiliki struktur ekonomi yang jelas dengan cakupan pertumbuhan dan perangkat kelembagaannya. Perekonomian suatu daerah/negara dianggap maju jika sudah mempunyai lembaga permodalan (bank dan non-bank) yang mapan, mekanisme pasar yang transparan, tidak ada ketimpangan modal antardaerah, dan masalah ketenagakerjaan yang telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, konsentrasi mazhab ini hanya difokuskan pada bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bertitik tolak dari struktur ekonomi tersebut, maka sebagian negara ada yang dikelompokkan ke dalam kapitalis agraris dan sebagian lainnya sebagai kapitalis industrial. Menurut Djojohadikusumo (1994), proses evolusi kapital perekonomian suatu negara diawali dengan kapitalisme agraris, kemudian menjadi kapitalisme komersial dan pada akhirnya sebagai kapitalisme industri. Oleh karena itu, perhatian para ekonom mazhab klasik memfokuskan diri pada pencarian atau identifikasi cara dan teknik pemanfaatan *input* produksi penting untuk mendukung percepatan proses pertumbuhan ekonomi. Dalam kajian Mazhab Klasik, kelompok negara-negara kapitalis industri (Eropa Barat dan Amerika Serikat) keadaannya jauh

lebih maju dibandingkan dengan kelompok negara kapitalis agraris dimana pada umumnya merupakan negara-negara bekas jajahan.

Proses negara kapitalis agraris menuju keadaan yang lebih maju kemudian dikenal dengan sebutan *development*, yang berarti “pembangunan” atau sering pula disebut dengan istilah “perkembangan”. Menurut Mazhab Klasik, suatu negara dikatakan berkembang apabila negara tersebut telah melampaui masa evolusi kapital dari agraris menjadi industrialis. Dalam terminologinya, kelompok negara yang telah berkembang ini kemudian dikenal sebagai kelompok negara maju (*developed country*). Namun demikian, indikator yang dipakai untuk menilai apakah suatu negara dikatakan telah berkembang atau belum adalah dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pembahasan lebih detail tentang adanya pengelompokan negara berdasarkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam buku karangan **Hess** dan **Ross** (1997) yang berjudul *Economic Development Theories, Evidence and Policies*.

Berdasarkan konsep yang ada tersebut, terminologi untuk penyebutan negara di luar *developed countries* (negara-negara maju) adalah *less developed countries* (LDC's) atau *developing countries* (negara-negara berkembang atau belum maju). Berdasarkan analisis ekonomi terhadap negara-negara LDC's menunjukkan, bahwa kondisi 'belum maju' ternyata tidak hanya mencakup tuntutan perlunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menyangkut permasalahan kekurangan pangan, kemiskinan, serta keterbatasan sumber daya. Hal ini berarti bahwa perumusan konsep ekonomi pembangunan yang diperlukan tidak hanya difokuskan pada masalah pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus mengakomodir masalah-masalah lain yang mencirikan ketertinggalan negara-negara yang belum maju atau sedang berkembang tersebut.

Sejalan dengan kepentingan, perkembangan teori dan aplikasinya, ekonomi pembangunan tumbuh sebagai cabang ilmu tersendiri dalam ranah ilmu ekonomi. Seiring dengan berakhirnya perang dunia ke-2, muncul lah sejumlah isu penting yang mendorong berkembangnya model dan metodologi ekonomi pembangunan (Blackman, *et. al.*, 2004). Sebagai sebuah bidang keilmuan yang relatif masih baru, alat analisis dalam kajian ekonomi pembangunan diadopsi atau merujuk pada berbagai jenis alat analisis dari cabang kajian lain dalam ranah ilmu ekonomi, misalnya perdagangan, ekonomi pertanian, serta organisasi industri.

Di awal perkembangannya, titik berat analisis ekonomi pembangunan merupakan aplikasi teori ekonomi untuk menjelaskan permasalahan pembangunan, khususnya pembangunan negara dunia ketiga. Dengan kata lain, pada saat itu fokus kajian ekonomi pembangunan (*development economics*) adalah pembangunan ekonomi (*economic development*) pada negara-negara LCD's (negara-negara dunia ketiga). Dari analisis terhadap negara-negara tersebut yang selanjutnya memberikan kontribusi besar pada perkembangan teori ekonomi pembangunan.

Teori dasar dari analisis tersebut menyatakan, bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi oleh pilihan model ekonomi dan model pembangunan yang diterapkannya, melainkan dipengaruhi pula oleh adanya karakteristik yang khas di setiap wilayah atau negara yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonominya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa *teori ekonomi pembangunan* merupakan acuan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena kegagalan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun. Contoh-contoh mengenai hal ini dapat ditemukan pada berbagai literatur ekonomi pembangunan, di mana umumnya merujuk pada kasus-kasus pembangunan ekonomi di negara-negara Afrika, Amerika Latin, kepulauan Karibia maupun Asia.

Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan akan memiliki dua kemampuan sebagai berikut.

1. Secara umum, Anda akan mampu untuk:
 - a. menguraikan apa yang dimaksud dengan teori ekonomi pembangunan;
 - b. menjelaskan perkembangan sejarah teori ekonomi pembangunan;
 - c. menjelaskan terminologi teori ekonomi pembangunan yang umum digunakan dalam pendekatan pembangunan suatu negara.
2. Secara khusus, Anda mampu untuk:
 - a. menjelaskan pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam teori ekonomi pembangunan;
 - b. menguraikan teori-teori dasar yang dicetuskan oleh beberapa pakar ekonomi pembangunan;
 - c. menjelaskan kelebihan dan kekurangan serta perbedaan mendasar dari teori-teori yang ada.

Kegiatan Belajar 1

Perkembangan Teori Ekonomi Pembangunan

Karena kekhasan dalam pengaplikasiannya, sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, harus diakui bahwa sejauh ini pemahaman mengenai teori ekonomi pembangunan masih beragam. Artinya, belum ada pemahaman universal tentang ekonomi pembangunan seperti halnya pada teori ekonomi mikro maupun ekonomi makro, di mana konsep, definisi baku, dan pola analisisnya yang seragam telah disepakati secara luas. Arsyad (1993) menyatakan, bahwa belum diterimanya teori ekonomi pembangunan secara luas dan baku dikarenakan luasnya cakupan analisis. Objek analisis pembangunan ekonomi merupakan suatu kajian konsep yang sangat luas. Oleh karena beragamnya pemahaman tentang ekonomi pembangunan tersebut, Hess dan Ross (1997) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan satu konsep yang rumit untuk didefinisikan dan diukur dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semata.

Terlepas dari kontroversi pemahaman tentang teori ekonomi pembangunan, suatu hal yang pasti bahwa komponen pokok dalam analisis ekonomi pembangunan mencakup indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembentukan modal, pengerahan tabungan, serta bantuan luar negeri. Secara terperinci, Blackman *et al.* (2004) mengelompokkan materi-materi dalam kajian ekonomi pembangunan ini ke dalam delapan aspek pokok, yaitu:

1. peran pemerintah,
2. pertumbuhan (ekonomi),
3. perdagangan dan industrialisasi,
4. hubungan antara negara miskin dan negara kaya (bantuan, perdagangan dan utang),
5. penyesuaian struktur dan stabilisasi,
6. perubahan penduduk,
7. perkembangan ekonomi, serta
8. tujuan dan strategi pembangunan.

Hess dan Ross (1997) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai dimensi kualitatif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi memerlukan perubahan struktur yang mendasar, yaitu meliputi usaha pengurangan kemiskinan dan penyebaran manfaat dari adanya makanan, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi juga merupakan usaha untuk mengubah ekonomi yang miskin, stagnan, dan primer-agraris menjadi ekonomi berkembang yang berbasis pada kehidupan perkotaan (*urban*), yang mampu bertahan secara berkesinambungan. Berdasarkan pendapat-pendapat Hess dan Ross (1997) serta Blackman *et al.* (2001) dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diindikasikan oleh adanya difusi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, konsep ini secara tegas membedakan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Uraian lebih detail tentang kedua konsep tersebut akan dibahas pada modul-modul berikutnya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa cakupan analisis dalam teori ekonomi pembangunan meliputi pokok-pokok pikiran yang luas dan secara ilmiah (*scientific*) belum terdapat kesepakatan umum tentang alat analisis bakunya. Menurut Djojohadikusumo (1994), bentuk-bentuk pendekatan teoretis ekonomi pembangunan dikelompokkan atas dasar titik berat analisis dan alat analisis yang digunakan, yaitu :

1. Pendekatan sosial budaya, pendekatan Neo-Marxis, dan Aliran “Dependencia”.
2. Pendekatan Strukturalis.
 - a. Model Lewi.
 - b. Strategi Pembangunan Berimbang.
 - c. Strategi Pembangunan Berdasar Sasaran Selektif.
3. Pendekatan Dualisme Tekno-Ekonomi.
4. Ekonomi Internasional.

Dalam modul ini hanya sebagian dari pendekatan tersebut yang akan dibahas secara lebih mendalam dibanding pendekatan lainnya. Beberapa pendekatan tersebut, di antaranya, adalah:

A. PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA

Pendekatan ini, kerangka analisisnya dikembangkan berdasarkan pada kajian-kajian bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan sosial-psikologi, khususnya mengenai tata sosial budaya dan perilaku masyarakat. Dalam kajiannya, pendekatan ini menempatkan permasalahan tata sosial budaya masyarakat sebagai isu atau dimensi analisis yang lebih penting dan dominan dibanding dengan perilaku ekonomi masyarakat itu sendiri. Empat tokoh pemikir penting penganut pendekatan ini adalah Hagen, Boeke, Geertz dan Hoselitz. Berikut ini dijelaskan teori-teori pendekatan yang dikembangkan oleh keempat pemikir tersebut.

1. Teori Perubahan Sosial Hagen

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh **Everette E. Hagen**. Dalam gagasannya, Hagen menyebutkan bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara berkembang adalah pada perubahan tata sosial budayanya. Kemajuan ekonomi merupakan fungsi dari perubahan kombinasi tiga bidang dalam kehidupan masyarakat, yaitu sosiologis, antropologis, dan psikologis. Perubahan sosial masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika perekonomian masyarakat yang otonom dan berpengaruh secara dominan. Jadi, kemajuan ekonomi akan tercapai apabila terjadi perubahan struktur internal di dalam masyarakat. Struktur tersebut, misalnya adalah masalah perilaku, kelembagaan dan kebiasaan masyarakat.

2. Teori Dualisme Boeke

Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir berkebangsaan Belanda, yaitu **J.H. Boeke**, yang mencermati pada negara-negara bekas jajahan negaranya, khususnya Indonesia. Ia melihat, bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Menurut Boeke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan stagnasi ekonomi tidak akan berhasil. Pengamatan Boeke sejauh ini menunjukkan bahwa tata sosial budaya masyarakat negara berkembang (terutama Indonesia) masih bersifat tidak rasional dan kaku sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pola/irama perekonomian modern dengan bentuk kelembagaan usaha yang praktis dan dinamis. Kondisi ini tampak terkait dengan dualisme yang berkembang

di kalangan masyarakat negara-negara berkembang dalam menggerakkan perekonomiannya.

Dualisme yang dimaksud oleh Boeke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian masyarakat memandang bahwa benturan antara budaya luar (bersumber dari barat) dengan budaya lokal (penduduk asli/pribumi) dianggap tidak bisa berubah (permanen), tidak dapat dihindari dan benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat.

Teori ini membedakan antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial. Menurut Boeke, pola pemenuhan kebutuhan masyarakat barat didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional (pertimbangan ekonomis). Sebaliknya pemenuhan kebutuhan masyarakat di negara-negara bekas jajahan, didasarkan pada kebutuhan non-ekonomis, yang umumnya adalah untuk mempertahankan gengsi (*prestige*) di mata masyarakat sosialnya.

Menurut Teori Dualisme Boeke, penawaran (pasok) produk barang tidak responsif terhadap tarikan harga. Bahkan sebaliknya karena pasok barang tersebut tidak bermotif menambah laba (*profit motivated*) maka kenaikan harga tidak menjadi insentif bagi masyarakat pribumi untuk meningkatkan pasokan. Demikian pula halnya dalam masalah pasokan tenaga kerja. Kurva suplai tenaga kerja bukan lurus ke kanan atas, melainkan akan membalik ke kiri pada titik tertentu sejalan dengan meningkatnya upah atau dikenal sebagai *backward banding supply curve of labor*. Dari sini Boeke menilai, bahwa gejala ini mengindikasikan adanya kelompok pemalas.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dasar analisis dalam Teori Dualisme Boeke adalah serangkaian dasar tata nilai masyarakat negara berkembang, yang tidak mendukung untuk perbaikan ekonomi. Berdasarkan keyakinannya tentang tata nilai masyarakat negara berkembang, Boeke berpendapat bahwa yang terbaik adalah membiarkan masyarakat tersebut seperti apa adanya (*just leave it alone*) dan membiarkan mereka untuk berpikir luhur, tetapi tetap miskin (*high thinking and plain living*).

Pendapat Boeke ini mendapat kritikan dari Djojohadikusumo (1994). Djojohadikusumo menganggap teori Boeke mengandung kesalahan fundamental. Kelemahan atau kesalahan fundamental tersebut terletak pada kerangka teoretis-analitis dan sejumlah pangkal dalil, yang menurut Djojohadikusumo tidak sesuai dengan bukti empiris sepanjang waktu. Dalam

kerangka teoretis analitis, teori dualisme mendasarkan pada asumsi bahwa kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas; konsep kebutuhan dan permintaan efektif sebagai cerminan daya beli ril tidak terakomodasikan dalam teori ini. Menurut Dojohadikusumo, rendahnya permintaan efektif masyarakat negara berkembang disebabkan oleh rendahnya daya beli ril sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Tegasnya, rendahnya permintaan efektif bukan karena kebutuhan masyarakat yang terbatas dan tidak adanya keinginan dan keperluan untuk meningkatkan kebutuhannya, sebagaimana diasumsikan oleh Boeke.

Sementara itu, terkait dengan sangkaan tidak adanya *motive profit*, survei di daerah-daerah Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi proses investasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi di daerah-daerah pertanian. Kesimpulan yang mematahkan pendekatan Boeke adalah bahwa ternyata investasi tersebut merupakan proses *re-investasi* dari keuntungan yang didapatkan dalam usaha tersebut. Jadi, secara umum, teori dualisme Boeke, tidak dapat diterima kebenarannya berdasarkan dasar teoretis analisis dan bukti empiris sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dojohadikusumo (1994).

3. Teori Involusi Geertz

Clifford Geertz adalah orang yang kemudian mengembangkan kerangka pemikiran Boeke, khususnya tentang konsep *expansion static*. Dalam Teori Dualisme, Boeke menyatakan adanya konsep *expansion static*, yaitu suatu kondisi kegiatan perekonomian yang berkembang (*expansion*), tetapi hanya disebabkan oleh adanya penambahan penduduk. Pertambahan penduduk, akan mendorong bertambahnya permintaan, akan tetapi pola produksi dan perekonomiannya masih tetap sama (*statis*). Walaupun secara absolut hasil produksi bertambah, namun peningkatan tersebut kemudian terserap lagi oleh pertambahan penduduk. Dengan demikian, pendapatan per-kapita penduduk tetap, bahkan cenderung turun apabila pertambahan nilai *output* produksi lebih rendah dari pertambahan penduduk. Fenomena inilah yang oleh Geertz disebut sebagai proses involusi (kebalikan dari evolusi) dalam hal ini involusi pertanian (*agriculture involution*). Geertz menunjuk, bahwa pranata sosial budaya yang kaku sebagai faktor penyebabnya. Situasi seperti itu cenderung mengarah pada apa yang disebut sebagai kemiskinan bersama (*shared poverty*).

Analisis dari ketiga pemikir tersebut di atas pada umumnya didasarkan pada asumsi bahwa seolah-olah kegiatan perekonomian negara-negara berkembang dipengaruhi hanya oleh pranata sosial budaya yang inheren dan melekat secara permanen pada masyarakatnya. Namun, tidak pernah dianalisis, bagaimana proses dan hasil interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan politiknya. Padahal kenyataannya ketiganya bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah.

4. Teori Perubahan Sosiologi dan Proses Pembangunan Hoselitz

Berbeda dengan analisis Hagen, Boeke, dan Geertz, **Hoselitz** mengembangkan teorinya pada analisis yang lebih berimbang antara faktor ekonomi dan sosial budaya, serta proses interaksinya. Dalam hal ini, proses transformasi ekonomi masyarakat dari satu sistem ekonomi (kapital agraris menjadi kapital komersial, industri dan supra industri) dipandang sebagai proses dinamika perubahan masyarakat. Jadi, dalam proses ini diasumsikan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat.

Namun, terhadap konsep status kondisi sosial masyarakat, Hoselitz masih membedakan antara tradisional dan rasional. Seperti pandangan pemikir-pemikir sebelumnya, kondisi sosial masyarakat tradisional menurut Hoselitz merupakan kondisi masyarakat yang statis, kaku, dan tidak mendukung evolusi, keadaan sebaliknya terjadi pada masyarakat rasional. Perbedaan pandangan Hoselitz dengan pemahaman pemikir-pemikir pendahulunya, terletak pada keyakinannya bahwa kondisi masyarakat tradisional bisa berubah. Hal itu merupakan fakta yang terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat mana pun di dunia. Untuk lebih memahami, Anda dapat membaca pembahasan pendekatan **Kuznet** tentang kondisi negara-negara Eropa Barat sebelum era pertumbuhan ekonomi, pada bagian Modul lainnya.

B. PENDEKATAN NEO-MARXIS DAN ALIRAN *DEPENDENCIA*

Pendekatan Neo-Marxis didasarkan pada ajaran Marxis tentang teori surplus mengenai eksploitasi terhadap tenaga kerja (kaum buruh) dan dialektika sebagai faktor dinamika perkembangan keadaan sosial masyarakat. Hal yang menonjol dalam teori ini adalah adanya konsep perjuangan kelas. Namun demikian, walaupun didasarkan pada ajaran Marxis, dalam

perjalanannya pendekatan Neo-Marxis berkembang sangat bervariasi, bahkan kadangkala sangat jauh dari konsep awalnya.

Djojohadikusumo (1994), menunjuk adanya ciri umum pada aliran-aliran Neo-Marxis, yaitu:

1. gagasan dan pandangan terhadap dunia *ketiga*, termasuk kebijakan yang perlu diambil, bersifat sangat normatif;
2. pola kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit menjurus pada evolusi radikal (revolusi);
3. pesimisme untuk menyelesaikan masalah dunia *ketiga*, selama dunia *ketiga* masih menjadi bagian (yang tertindas) dari sistem kapitalisme dunia, sangat menonjol.

Namun demikian, aliran ini memiliki kelemahan dalam analisis ekonomi, bahkan kadang kala tidak terlihat. Pesimisme dan perjuangan kelas sangat terlihat pada dogma kelompok ini, yang menganggap bahwa kondisi kemakmuran yang terjadi pada negara-negara industri sekarang ini merupakan konsekuensi logis dari kelanjutan proses eksploitasi terhadap negara-negara dunia ketiga (penjajahan, perdagangan internasional yang tidak adil) oleh negara-negara maju. Dikatakan bahwa sangat tidak mungkin bagi negara maju untuk mencapai kondisi sekarang ini tanpa ada pemerasan terhadap masyarakat dunia ketiga. Beberapa tokoh pemikir penting aliran Neo-Marxis dalam ekonomi pembangunan di antaranya adalah **Paul Baran**, **A.G. Frank**, **F.H. Cardoso**, **E. Faletto**, dan **W.F. Wertheim**.

1. Teori Potential Surplus Paul Baran

Karya ilmiah Paul Baran yang berjudul *The Political Economy of Growth* (1957) dianggap sebagai karya ilmiah yang paling bermutu di antara pemikir Marxis dan Neo-Marxis setelah Perang Dunia II. Baran, mengadopsi pangkal teori Marxis dan menganalisis hubungan antara negara-negara maju dan negara dunia ketiga. Berdasarkan analisisnya, ia menyatakan bahwa negara-negara dunia ketiga telah terperangkap pada kapitalisme dunia. Oleh karena itu, negara-negara berkembang tidak mungkin mengejar ketertinggalan oleh negara-negara maju, kecuali apabila mereka melaksanakan revolusi.

Kesimpulan analisis Baran didasarkan pada konsep surplus potensial (*Potential Surplus*) dengan mengembangkan teori surplus Marx. Surplus potensial dinyatakan sebagai selisih dari tingkat produksi yang seharusnya

bisa dicapai dikurangi konsumsi esensial (*riel*) dalam masyarakat. Tingkat produksi yang seharusnya (*potential*) dinyatakan sebagai pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat capaian ekonomi tertentu, dengan aplikasi teknologi tertentu serta penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) serta dalam kapasitas produksi yang sudah terpasang.

Menurut Baran terjadinya kapitalisme dunia negara-negara maju merupakan proses kelanjutan feodalisme di zaman pra-kapitalis. Kelompok feodal Eropa Barat pada zaman tersebut melakukan penaklukan dan penjarahan terhadap masyarakat pra-kapitalis lain, serta memeras sumber daya ekonominya secara terus-menerus sampai sekarang. Hasil tersebut merupakan dasar bagi negara-negara tersebut untuk berkembang dan menjadi negara maju (negara kapitalis). Negara-negara dunia *ketiga* terjebak dalam kapitalisme dunia sebagai akibat dari kondisi tersebut.

2. Aliran Dependencia

Aliran Dependencia, mengikuti gagasan Paul Baran. Aliran ini mempertanyakan secara kritis, mengapa kapitalisme seperti di negara-negara industri tidak muncul di negara-negara dunia *ketiga*. Kapitalisme yang muncul pada negara-negara tersebut adalah kapitalisme periferi/pinggiran (*peripheral capitalism*). Padahal kapitalisme menjadi prasyarat sebagai tahap awal (*milestone*) untuk memasuki masyarakat sosialis. Aliran Dependencia ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok aliran kiri garis keras (radikal) yang dimotori oleh **Gunder Frank** dan kelompok aliran kiri reformis moderat yang digerakkan oleh **Cardoso** dan **Faletto**.

Menurut aliran ini, yang dimaksud *dependencia* adalah ketergantungan rakyat di negara-negara dunia ketiga terhadap negara-negara kaya sebagai konsekuensi logis dari pemerasan sistematis (imperialisme) yang berlangsung berabad-abad pada masa lalu. Pada sisi lain, kondisi ini terjadi juga karena karakteristik perekonomian negara-negara berkembang yang seragam sehingga mengalami persaingan baik antarnegara berkembang sendiri maupun antara negara berkembang dengan negara maju.

Gunder Frank menyatakan bahwa faktor utama penyebab ketergantungan tersebut di atas adalah adanya aliansi feodalisme-imperialisme yang sangat kuat efeknya. Aliansi tersebut melibatkan komponen yang berasal dari dalam maupun dari luar, yaitu:

- a. feodalisme lapisan atas dalam tubuh masyarakat negara berkembang sendiri, dan
- b. kekuatan imperialisme kapitalis internasional negara-negara maju.

Keberadaan kekuatan ganda feodalisme-imperialisme tersebut sangat tidak mendukung berlangsungnya transformasi gradual (evolusi) bagi perekonomian negara-negara dunia *ketiga*. Menurut Gunder Frank dan kelompoknya, hal ini karena posisi negara-negara dunia *ketiga* yang selalu terjebak pada kapitalisme dunia. Untuk itu yang dibutuhkan oleh negara-negara dunia *ketiga* adalah pemutusan hubungan/keterkaitan mereka dengan sistem kapitalisme dunia. Atas dasar kerasnya rekomendasi yang mereka berikan, garis pemikiran aliran ini dikenal sebagai garis pemikiran radikal.

Sementara itu, Cardoso dan Faletto mengeluarkan gagasan yang dasar analisisnya kurang lebih sejalan dengan Gunder Frank dan Paul Baran. Letak perbedaan pemikiran Cardoso dan Faletto dengan Gunder Frank dan Paul Baran berawal dari adanya bukti empiris yang menunjukkan bahwa proses investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional/ transnasional di negara-negara dunia ketiga memungkinkan untuk terjadi industrialisasi meski tidak sehebat di negara-negara kapitalis inti. Dengan demikian, proses pembangunan akan terjadi meski ciri ketergantungan tetap ada. Jalan keluar yang direkomendasikan oleh kelompok ini adalah transformasi atau setidaknya reformasi. Dengan rekomendasi semacam itu, kelompok ini dinilai lebih bersifat reformis moderat.

3. Pendekatan Revolusi Sosiologis Wertheim

Pendekatan sosiologis **Wertheim** menyetujui adanya ekspansi statis, teori Dualisme Boeke dan teori involusi Geertz yang menyebabkan stagnasi ekonomi dengan seluruh asumsi faktor yang mempengaruhinya. Menurut Wertheim satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan revolusi radikal, tetapi bukan dengan bersenjata seperti disarankan Aliran Dependencia. Sebagai alternatifnya, Wertheim menyarankan dilakukannya gerakan masa yang terstruktur dengan baik, yang dibekali dengan pendidikan intensif dan penyuluhan secara menyeluruh.

Secara umum pemaparan tentang Neo-Marxis di atas menunjukkan bahwa pendekatan ini secara dogmatis juga terjebak pada hal yang mendasar, yaitu teori-analisisnya (Djojohadikusumo, 1994). Ini terjadi karena sejumlah prasyarat teori yang diambil sebagai dalil diasumsikan tidak berubah selamalamanya. Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa secara perlahan telah terjadi pergeseran sehingga cara pandang neo-Marxis semakin menuju pada realitasnya.

C. PENDEKATAN STRUKTURALIS

Pada pendekatan strukturalis, pola analisis sudah dikembangkan dalam *frame work* (kerangka) yang lebih luas dengan mensintesis hubungan antara proses sosial (non-ekonomi) dan proses ekonomi. Terminologi kunci dalam pendekatan strukturalis adalah transisi dan transformasi. Oleh karenanya, pendekatan ini sering disebut sebagai **pendekatan strukturalis transisi dan transformasi**.

Kelompok aliran ini berpendapat bahwa pembangunan memerlukan proses transisi, yaitu proses peralihan dari satu jenjang perekonomian sederhana menjadi perekonomian yang berkembang. Pada faktanya, proses transisi (peralihan) juga merupakan proses perubahan penjelmaan (transformasi) dari satu keadaan perekonomian menjadi keadaan perekonomian lain. Sebagai contoh, apabila suatu ekonomi agraris mengalami transisi menjadi ekonomi industri maka sebenarnya juga terjadi perubahan keadaan perekonomian (pelaku, perangkat, peraturan dan karakter sosial masyarakat) dari orientasi agraris menjadi perekonomian berorientasi industri. Dengan begitu, sebenarnya dalam proses pembangunan, perekonomian mengalami perubahan struktural yang melalui proses transisi dan transformasi.

Aliran ini menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tidak hanya mungkin, melainkan harus dilakukan pada negara-negara berkembang. Pembangunan harus dilakukan secara sadar dengan menghilangkan kelemahan mendasar yang melekat pada struktur ekonomi yang bersangkutan. Salah satu kelemahan mendasar yang harus ditiadakan adalah kekakuan (*rigidity*) interaksi antarsektor ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya, yang sering mendorong ke arah ketidakseimbangan (*disequilibrium*) sehingga peranan pemerintah di negara-negara berkembang dianggap penting karena diperlukan untuk mengawal perkembangan ekonomi ke arah kondisi keseimbangan, yang ditandai dengan bekerjanya sistem pasar dan mekanisme harga.

Berdasar analisis empiris di negara-negara berkembang, perubahan atau transformasi perekonomian pada umumnya mengarah dari sektor produksi primer (pertanian, perikanan, dan pertambangan) menjadi sektor produksi sekunder (manufaktur, konstruksi) dan kemudian menuju ke sektor tersier (jasa dan perdagangan). Sejalan dengan transformasi ekonomi, berlangsung pula transformasi pada bidang ketenagakerjaan. Ditandai dengan sebagian

besar tenaga kerja pada sektor primer tersalurkan pada sektor sekunder maupun tersier. Pola transaksi perekonomian juga mengalami pergeseran dari transaksi domestik, mengarah pada transaksi lebih terbuka dengan masuknya transaksi perdagangan luar negeri. Akibat dari proses-proses dan transformasi tersebut adalah diversifikasi pada produksi dan perdagangan.

Pendekatan strukturalis sebenarnya tidak berangkat dari satu mazhab pemikiran yang homogen. Oleh karenanya, terdapat berbagai variasi penerapan dalam pendekatan ini. Hal ini tergantung pada jenis variabel pokok yang dianalisisnya. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga aliran dalam pendekatan ini, yaitu:

1. aliran dengan strategi yang bertolak dari pasokan tenaga kerja tidak terbatas,
2. aliran dengan strategi pembangunan berimbang, dan
3. aliran dengan strategi pembangunan berdasar sasaran selektif (Djojohadikusumo, 1994).

D. MODEL PEMBANGUNAN PENAWARAN TENAGA KERJA TAK TERBATAS

Model ini dikembangkan oleh **Arthur Lewis**, yang dikenal dengan istilah *Lewis's two sector model*. Menurut Lewis, perekonomian dibedakan menjadi perekonomian tradisional dan sektor modern. Perekonomian tradisional dicirikan dengan produktivitas rendah, bersifat sub-sisten dan menggunakan tenaga kerja sendiri (*self-employment*). Hal ini karena perekonomian tradisional memiliki suplai tenaga kerja yang banyak. Sementara itu, perekonomian modern lebih bersifat komersial, memerlukan modal/ kapital dan tenaga kerja upahan serta mengandung unsure motif keuntungan (*profit motive*). Apabila sektor modern membutuhkan tenaga kerja, pasokan tenaga kerja akan diambil dari sektor tradisional.

Oleh karena adanya pengangguran terselubung (*disguised employment*) yang menyebabkan produktivitas marginal tenaga kerja yang rendah atau bahkan nol, para majikan tidak perlu meningkatkan upah tenaga kerja. Atas dasar ini, diasumsikan bahwa pasokan atau suplai tenaga kerja di sektor tradisional tidak terbatas. Menurut Lewis, kelebihan tenaga kerja sektor tradisional (informal dan sub-sisten) dapat ditransfer secara mulus kepada sektor modern. Namun, ini ternyata sangat bertentangan dengan fenomena

tenaga kerja di negara berkembang sehingga beberapa pemikir mencoba menyempurnakan gagasan Lewis.

John C.H. Fei dan **Gustav Ranis** merupakan dua di antara pemikir yang berusaha menyempurnakan ide Lewis dengan memperkenalkan gagasan pengembangan ekonomi surplus tenaga kerja (*Development of the Labour Surplus Economy*, 1964). Inti dari ide kedua pemikir ini adalah bahwa pada sektor tradisional perlu dilakukan investasi teknologi. Sebagai contoh, revolusi hijau yang berakibat pada kelebihan produksi dan pengurangan *input* tenaga kerja. Kelebihan produksi akibat revolusi hijau tersebut akan meningkatkan perekonomian. Sementara itu, kelebihan atau surplus tenaga kerja dapat ditransfer ke sektor modern. Begitu sistem berjalan, investasi teknologi di sektor tradisional semakin besar. Hal ini akan mendorong ekonomi berkembang menjadi lebih modern dan suplai tenaga kerja semakin besar.

Suplai tenaga kerja ke sektor modern hanya dibatasi oleh laju pertumbuhan angkatan tenaga kerja (dipengaruhi laju pertumbuhan penduduk). Apabila laju ini lebih rendah dari pertumbuhan permintaan tenaga kerja oleh sektor modern kelebihan tenaga kerja tersebut akan semakin berkurang, sampai akhirnya kedua sistem perekonomian akan berjalan mengarah pada sektor modern.

E. TEORI *BIG PUSH* STRATEGI PEMBANGUNAN BERIMBANG

Teori ini pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan di negara berkembang hanya bisa dilakukan dengan adanya pendorong yang sangat kuat (*big push*). Pendorong ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar barang dan jasa, serta investasi. **Ronstein-Rodan**, sebagai pencetus ide ini menyarankan untuk dilakukannya investasi yang sangat besar dan bersifat komplementer dalam berbagai bidang sebagai *big-push* (pendorong) ekonomi. Teori investasi ini didasarkan pada konsep *external economies* oleh Alfred Marshal, di mana perkembangan satu sektor ekonomi akan menjadi *external economy* yang mendorong sektor lain. Adapun syarat untuk terjadinya perkembangan semacam itu adalah bahwa investasi tersebut harus bersumber pada negara berkembang sendiri sehingga terjadi efek multiplier di dalam negeri.

Teori *big-push* ini kemudian dikembangkan oleh **Ragnar Nurkse**, yang menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan mengembangkan

semua sektor secara bersamaan dan berimbang. Dengan demikian, investasi yang beragam diperlukan untuk mendorong permintaan agregat, secara komplementer. Atas dasar pola pikir seperti itu, konsep ini disebut sebagai konsep pembangunan strategi berimbang. Pendekatan lebih luas dan komprehensif yang disarankan oleh pendekatan ini sangat berguna dalam analisis ekonomi pembangunan.

Namun demikian, pendekatan ini ternyata tidak didukung dengan konsep teoretis dan empiris yang masuk akal (Djojohadikusumo, 1994). Alasannya adalah secara empiris, investasi dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan bagi negara berkembang justru menjadi kendala utama. Secara teoretis, investasi besar-besaran untuk seluruh kebutuhan investasi berlawanan dengan konsep kelangkaan sumber daya (termasuk modal) untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pencetusan teori pembangunan selektif di bawah, yang merupakan bantahan terhadap konsep Rosntain-Rodman dan Nurske.

F. KONSEP PEMBANGUNAN SELEKTIF

Berbeda dengan konsep Rosntain-Rodman dan Nurske, **Albert Hirshcman** dan **Hans W. Singer** justru berpikiran sebaliknya. Pemikiran mereka didasarkan konsepsi bahwa investasi, sebagai implementasi pembangunan, harus dilakukan secara selektif pada bidang-bidang tertentu. Hal ini mengingat adanya keterbatasan sumber modal untuk investasi pada hampir semua negara-negara berkembang. Dengan meyakini akan adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain (*backward* dan *forward linkage industry*) maka investasi pada satu sektor akan bergerak dan menghela sektor lain. Untuk memungkinkan hal ini terjadi, yang diperlukan adalah evaluasi berkala. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mereviu apakah investasi perlu diteruskan atau dialihkan pada bidang lain. Dasar pemikiran yang juga melatarbelakangi konsep pembangunan selektif adalah keyakinan Hirschmann bahwa kondisi tidak berimbang (disekuilibrium) mendorong dinamika pembangunan sehingga pembangunan itu dilaksanakan secara tidak berimbang (*imballance*).

Pada sisi lain, Singer menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan secara serentak (berimbang) membutuhkan investasi yang sangat besar. Apabila konsep *big-push* akan diterapkan pada satu sektor (industri) untuk mendorong transformasi dari ekonomi agraris/ tradisional ke sektor modern

maka perlu ada dukungan sektor pertanian agar kelangkaan pangan tidak terjadi. Sebaliknya, apabila *big-push* diterapkan untuk seluruh sektor perekonomian maka hal ini membutuhkan dana yang sangat besar.

Apabila suatu masyarakat telah mampu mengerahkan dana sedemikian besar maka sebenarnya masyarakat telah masuk dalam kelompok masyarakat negara maju. Secara lebih ringkas adalah skala prioritas harus menjadi bagian dari setiap keputusan politis yang diambil oleh pemerintah di negara-negara berkembang. Sebagai acuan, prioritas harus diberikan pada sektor-sektor yang diperkirakan akan mampu mengembangkan fundamental ekonomi ke arah yang lebih kokoh, mengembangkan ekspansi pasar dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

G. PENDEKATAN DUALISME TEKNO-EKONOMIS

Pendekatan dualisme ini dikembangkan oleh **Hla-Mint**, yang prinsipnya berbeda dengan analisis dualisme kebudayaan dalam Teori Boeke (dan Heertz). Dualisme dalam teori ini adalah tentang teknologi dan ekonomi (teknno-ekonomis). Mint menyoroti tentang adanya dualisme dalam bidang teknologi dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat negara berkembang.

Berdasar pada analisis ini, pengembangan teknologi pada sektor-sektor ekonomi di negara berkembang pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaan politik dan ekonomi negara atau industri maju. Hal ini terlihat, terutama pada saat periode penjajahan, dan masih tetap terasa sampai sekarang. Pada masa penjajahan, proses pengembangan teknologi hanya dikembangkan pada sektor-sektor yang memenuhi permintaan produk pada pasar internasional untuk memenuhi kepentingan negara penjajah maupun industri-industri di negara penjajah, contohnya adalah perkebunan dan tambang. Dalam format yang sedikit berbeda, kondisi seperti ini tetap berlanjut pada masa sekarang, di mana negara berkembang secara ekonomi dijajah oleh negara maju.

Dari sudut perekonomian, kita dapat menyaksikan berkembangnya agen perekonomian yang menguasai rantai tata niaga yang menghubungkan produsen, pedagang perantara (tengkulak), saudagar besar, dan industri. Golongan pedagang perantara (tengkulak, komprador), mempunyai fungsi ganda, baik untuk kepentingan rantai yang menghubungkan produsen dan saudagar yang berafiliasi dengan negara/ industri maju, maupun pada proses transaksi ekonomi. Pada masa penjajahan, kelompok ini memonopoli *input* produksi produsen dan monopsoni hasil produksi (hasil bumi). Pada

umumnya, kelompok ini juga didatangkan oleh ‘penjajah’ dari luar wilayah negara terjajah, seperti etnis India dan Sri Lanka di Myanmar (Birma) dan etnis Cina (Asia Tenggara). Akibatnya, terjadilah dualisme ekonomi, yaitu produsen (masyarakat pribumi) dan jasa (kelompok pedagang) yang mewakili kepentingan negara penjajah dan industri (yang sudah lebih maju). Apabila digabung dengan kondisi teknis maka terjadi dualisme teknis-ekonomis. Pada faktanya hal ini juga ditambah dengan adanya akumulasi kapital dari proses transaksi ekonomi yang sebagian besar mengarah pada kelompok modern (walaupun dalam satu wilayah negara) karena terkait dengan kepentingan kelompok penjajah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya lingkaran setan yang sangat pelik.

Untuk mengatasi siklus yang tidak menguntungkan seperti itu, Mint memandang perlu dihilangkannya dualisme teknis-ekonomis. Caranya adalah dengan mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Namun demikian, hal ini memerlukan tidak hanya tambahan *input* sumber daya, melainkan juga pembinaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Tantangan berat menyangkut hal ini adalah perlunya pelaksanaan terstruktur dan dalam tahapan operasional yang jelas.

H. PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Untuk meningkatkan agregat *demand* (permintaan) di dalam negeri, secara teoretis negara-negara berkembang harus melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Akan tetapi, dengan karakteristik perekonomian dan sistem penguasaan kapital dan sumber daya yang tidak seimbang, maka tidak ada formula yang mudah pula untuk mengimplementasikan saran teoretis tersebut. **Gunar Myrdal** dan **Raul Prebisch** merupakan dua pemikir yang selalu mengkritisi kondisi perdagangan internasional yang tidak seimbang antara negara-negara maju dan negara berkembang sehingga merasa pesimis bahwa perdagangan internasional mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Premis penting dari gagasan Myrdal adalah ketimpangan dalam struktur politik dan pembagian kekayaan yang tidak merata dalam masyarakat (lihat Teori Dualisme Tekno-Ekonomis Mint), yang menjadi kendala utama dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Walaupun sejalan dengan dalil Marx, Myrdal mengusulkan solusi yang berbeda. Myrdal menyatakan perlunya kebijakan negara untuk membatasi konsentrasi kekuasaan politik dan melakukan pendidikan dan pembinaan kehidupan kelembagaan

masyarakat secara menyeluruh untuk mengubah pandangan masyarakat. Termasuk di dalamnya pendidikan dan pembinaan yang disarankan oleh Myrdal adalah kegiatan transaksi dan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional yang terjadi dalam kondisi tidak seimbang menyebabkan *backwash-effect* (kondisi di mana semua faktor mendorong terjadinya stagnasi) lebih dominan dibanding *spread effect* (pengaruh faktor-faktor positif terkait dengan adanya perdagangan). Pada kondisi perekonomian yang tidak seimbang, produktivitas marginal *input* produksi (termasuk tenaga kerja dan modal) di negara-negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dengan demikian, transaksi perdagangan justru menyebabkan terjadinya akumulasi modal pada negara-negara maju karena efisiensi yang dimilikinya. Efisiensi menarik lebih banyak modal ke negara-negara maju, dibandingkan ke negara-negara berkembang dan mendorong terjadinya kemandegan ekonomi di negara-negara berkembang. Inilah saat di mana *backwash-effect* terjadi. *Spread effect*, tidak akan mampu melawan pengaruh *backwash effect* yang arahnya berlawanan. Kondisi ini diperparah oleh kompetisi antarnegara berkembang sehingga perekonomian dan transaksi internasional tersebut justru mengakibatkan disequilibrium bagi negara-negara berkembang.

Raul Prebisch menyatakan, walaupun berangkat dari dan sejalan dengan *aliran dependencia*, justru mempunyai kesimpulan yang mendukung gagasan Myrdal. Dalam hal perdagangan internasional, Prebisch mengangkat dua permasalahan utama, yaitu terjadinya disequilibrium yang menurunkan neraca pembayaran luar negeri negara *periferi* dan perkembangan nilai tukar komoditi industri primer terhadap barang industri (*terms of trade*) yang cenderung merugikan negara-negara berkembang. Hal ini menurut Prebisch menyebabkan dua permasalahan pokok lainnya, yaitu kesenjangan pendapatan negara maju dan negara berkembang, serta pengangguran kronis di negara periferi. Dua permasalahan tersebut saling terkait dalam hubungan sebab akibat. Hal ini terjadi karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara struktur ekonomi di negara maju dan industri. Pada konteks ini, Prebisch berpendapat bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan melalui industrialisasi, yang ditujukan untuk melakukan substitusi terhadap barang impor dan diversifikasi ekspor, baik secara horizontal maupun vertikal.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Kegiatan Belajar 1 diatas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori ekonomi pembangunan!
- 2) Apa yang dimaksud dengan *Less Developed Countries* (LDC's) menurut rumusan teori ekonomi pembangunan?
- 3) Jelaskan teori pembangunan ekonomi menurut pendapat Hess dan Ross!
- 4) Jelaskan tentang pengertian pembangunan melalui pendekatan sosial-budaya!
- 5) Jelaskan perbedaan prinsip tentang teori dualisme Boeke dengan teori involusi Geertz!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal latihan di atas, Anda dapat mempelajari kembali Kegiatan Belajar 1 khususnya pada materi yang membahas tentang :

1. Pengantar teori ekonomi pembangunan.
2. Perkembangan teori-teori ekonomi pembangunan.
3. Pendekatan sosial-budaya dalam pembangunan.
4. Perbedaan-perbedaan dasar yang digunakan dalam teori-teori pendekatan pembangunan.



RANGKUMAN

Berdasarkan kepentingan dan pengaplikasiannya, ekonomi pembangunan tumbuh sebagai cabang ilmu tersendiri dalam ranah ilmu ekonomi. Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II, muncul sejumlah isu penting yang mendorong perkembangan model dan metodologi dalam ekonomi pembangunan. Sebagai sebuah bidang keilmuan yang relatif baru, alat analisis dalam kajian ekonomi pembangunan diadopsi atau mengacu pada berbagai analisis dari bidang kajian lain dalam ranah ilmu ekonomi, misalnya perdagangan, ekonomi pertanian, dan organisasi industri.

Terlepas dari adanya sejumlah kontroversi tentang pemahaman teori ekonomi pembangunan, terdapat satu hal yang pasti, yaitu bahwa

komponen pokok dalam analisis ekonomi pembangunan mencakup indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembentukan modal, penyerahan tabungan, serta bantuan luar negeri.

Blackman *et al.* (2004) mengelompokkan materi-materi dalam kajian ekonomi ke dalam delapan aspek, yaitu:

1. peran pemerintah,
2. pertumbuhan ekonomi,
3. perdagangan dan industrialisasi,
4. hubungan negara miskin dan kaya, (bantuan, perdagangan, dan utang),
5. penyesuaian struktur dan stabilisasi,
6. perubahan penduduk,
7. perkembangan ekonomi, dan
8. tujuan dan strategi pembangunan.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Analisis ekonomi pada negara-negara LDC's (*less developed countries*) menunjukkan bahwa kondisi “belum maju” tidak hanya mencakup tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan masalah-masalah berikut ini, yaitu
 - A. kependudukan, angkatan kerja, dan kesejahteraan
 - B. kekurangan pangan, kemiskinan, dan angkatan kerja
 - C. kekurangan pangan, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya
 - D. kependudukan, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya
- 2) Pendekatan sosial-budaya dalam masalah pembangunan, pengembangan kerangka analisisnya didasarkan pada bidang ilmu
 - A. sosiologi, antropologi, dan psikologi-sosial
 - B. ekonomi, sosiologi, dan antropologi
 - C. ekonomi, hukum, dan antropologi
 - D. sosiologi, ekonomi, dan psikologi-sosial
- 3) Teori Domar menyimpulkan bahwa jika terdapat gangguan yang mendorong penyimpangan pada laju pertumbuhan investasi dari laju kritisnya (s/k) maka penyimpangan tersebut akan
 - A. terjadi secara periodik
 - B. terjadi secara terus-menerus

- C. tidak terjadi apa-apa
 - D. terakumulasi pada laju penyimpangan
- 4) Teori perubahan sosial pertama kali dikembangkan oleh
- A. Everette E. Hagen
 - B. Soemitro Djoyohadikusumo
 - C. Adam Smith
 - D. J.H. Boeke
- 5) Menurut teori Dualisme, penawaran (pasok) produk barang tidak responsif terhadap
- A. laju peningkatan harga
 - B. tarikan harga
 - C. laju investasi
 - D. jumlah permintaan kerja

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Pembangunan Ekonomi versus Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kajian antara ekonomi dan pembangunan, terdapat dua konsep penting yang saling berhubungan tetapi sering disalahartikan, yaitu **pertumbuhan ekonomi** dan **pembangunan ekonomi**. Secara teoretis, konsepsi dan pemahaman atas kedua istilah tersebut telah mengalami pergeseran sepanjang sejarah pemikiran ekonomi yang bersumber pada kondisi faktual perekonomian masyarakat secara luas (negara maupun global). Perkembangan konsep teoretis tersebut sampai pada pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan. Hal lain yang juga menjadi bagian dari pembangunan di antaranya adalah peningkatan keadilan (*justice*), keamanan (*safety*), dan kesejahteraan (*welfare*).

Berdasarkan sejarahnya, teori-teori pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkembang pada waktu yang bersamaan, yaitu setelah terjadi Perang Dunia II. Akan tetapi, berpangkal pada kondisi perekonomian yang berbeda, kedua teori tersebut mempunyai skenario akhir yang berbeda. Sejumlah teori modern tentang pertumbuhan dipaparkan oleh golongan Neo-Keynes dan Neo-Klasik (Dojohadikusumo, 1994 dan 1980), yang pada dasarnya didasarkan oleh pemikiran Keynes. Teori pertumbuhan ekonomi didasarkan pada hubungan yang seimbang antara tabungan, investasi, pendapatan, dan tabungan. Dengan demikian, titik tumpu analisis teori pertumbuhan adalah pada keempat hal tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada satu konsep pengukuran tunggal (*univariate*), misalnya satuan unit produksi atau pendapatan. Di samping itu, pengukuran pertumbuhan ekonomi umumnya dilakukan secara kuantitatif dengan nilai-nilai numerik yang pasti, misalnya produksi nasional atau pendapatan nasional. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan ekonomi merupakan konsep empiris-kuantitatif dan dapat diuji secara empiris. Pengukuran pertumbuhan dapat didekati melalui jumlah sarana yang diperlukan dan *output* yang dihasilkan. Dalam hal ini, yang diukur adalah jumlah besaran, tanpa melihat kualitas pertumbuhannya, misalnya tingkat distribusinya dalam masyarakat. Karena sifatnya yang *mono-variate*,

penggunaan variabel-variabel untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut memunculkan banyak kritik (Nijkamp, 1980). Salah satu contoh adalah sebuah konsep yang telah umum dipergunakan dan ternyata kurang tepat, yaitu konsep per kapita. Konsep ini mengukur secara aritmetik besaran produksi atau pendapatan yang dibagi dengan jumlah penduduk, tanpa melihat (mengabaikan) bagaimana struktur dan komposisi distribusi produksi atau pendapatan di antara penduduk.

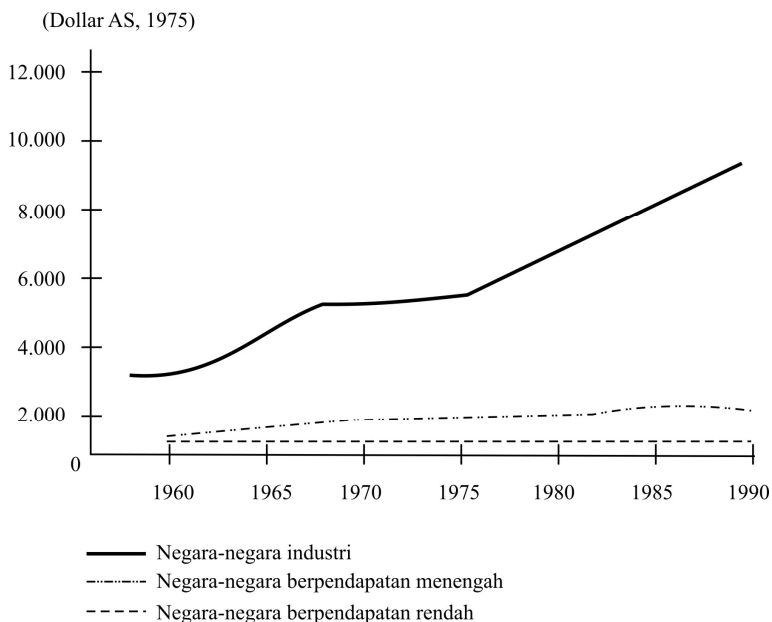
Menurut Djojohadikusumo (1994) serta Hess dan Ross (1997), pada kenyataannya pembangunan justru merupakan konsep yang lebih luas, dan bahwa dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan. Tetapi perlu diingat juga, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu komponen dalam pembangunan. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa proses pembangunan harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun, pembangunan tidak hanya berhenti sampai pada proses menghasilkan pertumbuhan ekonomi saja. Sebab, proses pembangunan mencakup juga hal lain seperti perubahan penggunaan sumber daya produktif untuk kegiatan ekonomi, distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi dan penduduk, serta perubahan dalam kerangka kelembagaan dalam masyarakat secara luas.

Lebih lanjut Bryant dan White (1985) menegaskan bahwa pembangunan merupakan suatu **konsep normatif**, yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut oleh **Mahatma Gandhi** sebagai “realisasi potensi manusia”. Pertumbuhan semata tidak banyak menyelesaikan persoalan, dan malah kadangkala mempunyai akibat yang tidak dikehendaki. Ahli mikrobiologi telah mengingatkan kita bahwa ciri penting sel kanker adalah tumbuh (terus tumbuh) tanpa membangun. Hal senada diungkapkan oleh Michael Todaro *dalam* Bryant dan White (1985) yang menyatakan bahwa “pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut”.

Berdasarkan dua pernyataan para ahli tersebut dapat digeneralisasi bahwa pertumbuhan memiliki perbedaan secara prinsip dengan pembangunan. Pertumbuhan lebih menyikapi aspek kuantitas dari variabel-variabel ekonomi yang dipergunakan dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan tujuan (*output*) suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan

pembangunan lebih menekankan pada prinsip kualitas dari proses-proses menciptakan atau merealisasikan potensi manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi tersebut.

Sementara itu, para ahli ekonomi memeriksa bukti tentang aplikasi pertumbuhan nyata selama dekade 1970-an dan menemukan hasil-hasil yang tidak berimbang. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa pertumbuhan aktual dalam ukuran agregat (*Gross National Product - GNP*, dan/ atau *Gross Domestic Product - GDP*), merosot dalam kurun tahun 1970-an. Pada beberapa negara, pertumbuhan bahkan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Gambar 1.1 mengilustrasikan suatu proyeksi perbandingan antara kecenderungan-kecenderungan GNP per kapita antara negara-negara industri, negara-negara berpendapatan sedang (menengah), dan negara-negara berpendapatan rendah (dunia ketiga) sampai tahun 1990.



Sumber: World Bank Development Report, 1979 (Washington, DC: World Bank, 1979), dalam Bryant dan White (1985, 9)

Gambar 1.1.
Kecenderungan GNP per Kapita, menurut Kelompok Negara antara Tahun 1960 - 1990

Angka-angka GNP tersebut menunjukkan bahwa jurang pendapatan antara negara kaya dan miskin makin melebar sebanyak 2% per tahun. Sedangkan perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk berarti bahwa jurang pendapatan per kapita antara negara-negara maju dan sedang berkembang melebar hingga 3,8% per tahun. Fenomena tersebut menjelaskan makin parahnya ketidakadilan yang terjadi di dalam negara-negara tersebut.

Selanjutnya Bryant dan White (1985) menyatakan bahwa dari sebuah studi ditemukan bahwa di beberapa negara, kemiskinan justru semakin buruk keadaannya dibandingkan dengan kondisinya di masa awal pertumbuhan. Banyaknya ketidakadilan sering kali meningkat justru pada saat kesejahteraan kaum miskin telah membaik. Salah satu ukuran ketidakadilan adalah persentase pendapatan nasional yang diterima oleh 5% penduduk yang berada pada lapis teratas (Bryant dan White, 1985).

Dalam konteks Indonesia, Prof. Mubyarto dalam salah satu opininya tentang Paradigma Kesejahteraan Rakyat dalam Ekonomi Pancasila memaparkan, “Memang benar bahwa pertumbuhan ekonomi positif rata-rata 7% per tahun berlangsung selama 30 tahun meskipun pernah terendah 2,2% pada tahun 1982”. Dan, walaupun Bank Dunia (1993) menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari delapan negara di Asia Timur sebagai *East Asian Miracle* yang telah mencapai *sustainable rapid growth with highly equal income distribution*. Namun, pada kenyataannya bahwa penempatan Indonesia sebagai negara yang sudah mampu membagi secara merata pendapatannya (*highly equal*) adalah sangat keliru oleh Bank Dunia.

Pada tahun yang sama, Sidang Umum MPR menyatakan telah munculnya kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang tajam dan jika dibiarkan akan berakibat pada keangkuhan dan kecemburuan sosial. Menurut Prof. Mubyarto, kekeliruan fatal dari masyarakat dan bangsa Indonesia adalah mengabaikan kesimpulan buku *East Asian Miracle*, Bank Dunia tersebut lebih benar. Akibatnya, tidak sampai Repelita VI selesai, krisis moneter yang merupakan “bom waktu” pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan tersebut meledak pada tahun 1997, tanpa kita mampu menduganya.

Secara lebih ekstrem Djojohadikusumo (1994) mencontohkan bahwa tanpa proses pembangunan juga bisa terjadi proses pertumbuhan ekonomi (terbatas). Pada masa penjajahan Belanda, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan karena adanya investasi pada sektor-sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan luar negeri maupun lembaga keuangannya oleh

VOC¹. Akan tetapi, kekuasaan ekonomi dan politik berada pada penjajah. Sebagai akibatnya adalah proses pembangunan terjadi di negeri penjajah meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi di negara terjajah. Peningkatan kesejahteraan penduduk, perbaikan fasilitas sosial serta pemerataan pendapatan berlangsung di negara-negara penjajah, bukan di negara terjajah karena adanya proses pertumbuhan ekonomi (peningkatan produksi) di negara-negara terjajah.

Proses pembangunan pada akhirnya harus juga dapat memacu proses perluasan kerja yang bersifat produktif (*productive employment*). Pembangunan ekonomi harus dapat men-*support* kelompok tenaga kerja produktif pada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, tingkat produksi yang terjadi merupakan agregasi produksi dari sejumlah individu yang jauh lebih banyak. Artinya, dalam proses pembangunan yang perlu ditingkatkan adalah jumlah produksi dan kelompok individu yang terlibat. Sedangkan dalam konsep pertumbuhan, yang ditingkatkan adalah jumlah besaran produksi, tanpa perlu memperhatikan bagaimana sebaran dan kontribusi individu yang terlibat.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara kuantitatif-empiris sehingga analisis dalam teori pertumbuhan juga dapat dilakukan secara kuantitatif. Konsep yang dikembangkan dalam teori pertumbuhan mengukur efektivitas *input* dalam bentuk investasi dengan *output* yang diperoleh, yang disebut dengan *capital-output ratio*. Analisis ini menunjukkan perbandingan (nisbah) antara pertambahan *input* kapital (investasi) dengan kenaikan pendapatan sebagai *output* dari investasi yang ditanam tersebut.

Seperti telah diuraikan di atas, dalam konstelasi perekonomiannya, teori ekonomi pembangunan dan teori pertumbuhan ekonomi berangkat dari kondisi perekonomian yang berbeda. Teori pertumbuhan didasarkan pada pandangan bahwa perekonomian sudah mempunyai struktur yang stabil sehingga pusat perhatian adalah peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memanipulasi variabel kunci yang mempunyai pengaruh signifikan. Pandangan ini tercipta karena pada umumnya teori pertumbuhan dikembangkan atas dasar kondisi di negara-negara yang sudah maju berbasis industri pada saat itu, misalnya negara-negara Amerika Utara dan Eropa

¹ VOC merupakan badan usaha yang cukup penting dan sangat dipandang pada masa itu dan basis operasi di Indonesia.

Barat. Oleh karenanya, asumsi dasar yang diterapkan pada teori pertumbuhan adalah kondisi perekonomian yang lebih baik, teknologi yang berkembang, dan prasarana ekonomi (baik fisik, kelembagaan, dan administratif) yang dibangun sempurna. Lebih lanjut, analisis juga difokuskan pada arah pertumbuhan, apakah pada sekitar keseimbangan ekonomi (ekuilibrium) atau di luar jalur tersebut.

Berbeda dengan teori pertumbuhan, teori ekonomi pembangunan berangkat dari kondisi perekonomian negara-negara yang baru terlepas dari penjajahan. Kondisi negara-negara tersebut dapat dideskripsikan dengan struktur ekonomi belum terbangun dengan baik, prasarana yang masih sangat lemah, kondisi perekonomian berada pada posisi stagnan, pengangguran tinggi, produksi rendah, investasi rendah, kemiskinan tinggi serta kondisi sosial yang masih tidak tertata. Oleh karena itu, pada analisis ekonomi pembangunan, tidak hanya diperlukan pemahaman tentang ilmu ekonomi, melainkan juga ilmu-ilmu pendukung lainnya.

Para pengkaji atau peneliti masalah ekonomi pembangunan perlu menerapkan ilmu sosiologi, sejarah maupun politik. Sampai pada tahap tertentu, alat analisis dari Mazhab Klasik dan Neo-Klasik, masih dapat diaplikasikan sebagai model awal (*building block*). Pada tahap berikutnya, perlu dilakukan penyesuaian untuk dapat menganalisis dinamika atau perubahan perekonomian. Berbeda dengan teori pertumbuhan yang lebih eksak dan dilakukan dalam jangka pendek, analisis perubahan dalam teori ekonomi pembangunan mencakup rentang waktu yang lebih panjang. Adanya keterkaitan dengan sejarah menyebabkan analisis ekonomi pembangunan juga melingkupi perspektif sejarah perekonomian di masa lalu serta prediksi perekonomian di masa mendatang.

Konsep pembangunan juga dapat diterapkan secara lebih luas ketimbang anggapan sebagian besar orang-orang. Konsep ini sering kali dipakai dalam pembicaraan mengenai bangsa-bangsa dunia *ketiga* (yang berdasarkan sejarah merupakan negara-negara terjajah). Namun, sesungguhnya konsep pembangunan dapat dipahami secara proporsional manakala orang-orang memandangnya sebagai suatu proses yang juga berlangsung di negara-negara industri (maju), seperti Amerika dan MEE. Negara-negara maju tersebut masih harus berjalan jauh untuk sampai pada “realisasi potensi manusia”. Banyak yang mesti ditinjau (*feedback*) mengenai kesenjangan dan pengentasan kemiskinan.

Di samping itu, negara-negara maju (industri) memiliki andil dalam membuat pembangunan menjadi begitu rumit diterapkan di negara-negara dunia *ketiga* (Bryant dan White, 1984). Oleh karena perbedaan prinsip antara konsep pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, kaitannya dengan negara-negara dunia ketiga tidak hanya semata-mata dikembangkan atau diperbaiki dengan ekspor teknologi, dan peningkatan perdagangan global. Akhir kesenjangan global tidaklah sesederhana dalam kerangka pengembangan/perbaikan teknologi dan peningkatan per-dagangan seperti tersebut di atas. Hal yang dibutuhkan adalah pembenahan orientasi (reorientasi) intelektual (perspektif ilmiah pembangunan), langkah-langkah serius menuju perubahan (restrukturisasi), dan peningkatan kerja sama secara praktis.

Hal ini karena acap kali terdengar oleh kita adalah pembangunan, namun yang sesungguhnya terlihat atau terjadi adalah kurangnya pembangunan (*underdevelopment*). Kemiskinan dengan segala seginya makin melebar, buruh-tani (termasuk nelayan) terus bergulat mempertahankan hidupnya menghadapi ketiadaan tanah milik (perubahan status lahan), gubuk hunian liar menjamur dari hari ke hari di wilayah perkotaan. Mereka terjepit di antara pemutar uang dan sang pemilik tanah, bergantung pada musim dan cuaca, serta akses yang terbatas atas benih, air, dan fasilitas. Kaum buruh-tani (pekerja) harus secara teliti dalam menimbang setiap langkah sebelum mengambil keputusan yang paling tepat untuk menjalani kehidupan di lingkungan yang memang padat dengan risiko tersebut.

Ukuran agregat pertumbuhan dalam wujud GNP (*Gross National Product*) dan harapan hidup serta tingkat kematian bayi menceritakan tentang perkembangan yang timpang. Penderitaan pihak-pihak tertentu, menumpuknya utang, lingkungan (sumber daya) yang makin terkuras, dan kesenjangan sosial yang terus bertambah adalah gambaran *underdevelopment*. Ironisnya, justru hal ini bagian dari *klaim* konsep pembangunan, dan karena realitasnya tidak jelas maka istilah tersebut menjadi bermacam-macam (Bryant dan White, 1989).

Dalam dasawarsa tahun 1950 – 1960, para ahli ekonomi cenderung mendominasi perdebatan tentang pembangunan ini. Kebanyakan dari mereka dalam dasawarsa tersebut menganggap industrialisasi sebagai hal yang paling tepat bagi suatu pertumbuhan (*growth*). Oleh karena itu, semua diupayakan pada apa yang dibutuhkan agar proses industrialisasi dapat terus berjalan. Menurut mereka, ada dua pendekatan yang digunakan pada kasus ini, yaitu:

Pertama, merangsang sektor industri yang sedang tumbuh. Pendekatan inilah yang paling sering ditempuh, dengan strategi memandang perekonomian tradisional sebagai suatu alternatif yang kompetitif, dan mendesain impor yang didasarkan (bertitik tolak) pada produktivitas sektor industri dimaksud.

Kedua, pendekatan ini kurang dilakukan, yaitu memobilisasi sektor tradisional dalam perekonomian untuk melayani upaya industrialisasi. Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa rakyat miskin yang hidup di pedesaan merupakan angkatan kerja potensial dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dipusatkan pada pengendalian dan pemanfaatan sektor-sektor tradisional yang belum berkembang demi proses pertumbuhan dan industrialisasi. Namun, fokusnya bukan berasal dari impor teknologi barat.

Asumsi kedua, untuk implikasi dari model pendekatan tersebut adalah pada tahap awal pertumbuhannya, pembangunan membutuhkan investasi besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Akibatnya, para perencana pembangunan berkesimpulan bahwa masalah keadilan dan pemerataan harus ditangguhkan selama kurun waktu tertentu. Kesimpulan ini mengukuhkan argumentasi bahwa pembangunan membutuhkan mekanisme kontrol yang kuat.

Bertitik tolak dari keterangan di atas, dapat digeneralisasi bahwa kendati mungkin dapat memperbaiki keadaan, pertumbuhan tidaklah mencukupi. Analoginya adalah, seorang Balita yang terus bertambah berat badannya (makin gemuk), hampir tidak dianggap “berkembang” oleh orang tua, dokter, maupun oleh orang-orang lain di sekitarnya yang menyaksikan pertumbuhan sang bayi tersebut. Demikian pula atas anggapan sementara para tokoh dunia negara-negara ketiga (negara-negara berkembang) yang tidak menganggap peningkatan GNP sebagai satu-satunya indikator pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan sebagai suatu peningkatan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat dalam mempengaruhi masa depan yang lebih baik memiliki beberapa implikasi tertentu, yaitu:

1. memberikan perhatian kapasitas (*capacity*) terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan daya untuk membuat suatu perubahan;
2. memberikan rasa keadilan (*equity*) karena perhatian yang berat sebelah pada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan

- mengurangi kapasitasnya dalam berpartisipasi pada program kebijakan pembangunan yang dijalankan;
3. memberikan kuasa dan wewenang (*empowerment*), dimaksud adalah bahwa jika masyarakat memiliki kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Implementasi *empowerment* tersebut di Indonesia terlihat dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, di mana daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan setiap sumber daya yang dimilikinya;
 4. memberikan jaminan akan keberlanjutan (*sustainable*) manfaat pembangunan dan hasil-hasilnya. Artinya, pembangunan harus mencakup perhatian jangka panjang, lebih berorientasi ke masa depan yang terangkum dalam istilah *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi hal ini berarti bahwa setiap keputusan produksi yang diambil harus memperhitungkan masa depan, lintas generasi, dan antargenerasi berikutnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Kegiatan Belajar 2 diatas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan persamaan dan perbedaan antara konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi!
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep pertumbuhan ekonomi merujuk pada satu konsep pengukuran tunggal (univariate)!
- 3) Jelaskan tentang pernyataan bahwa pembangunan merupakan konsep yang lebih luas dan dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan!
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud oleh Bryant dan White (1985) bahwa pembangunan adalah suatu konsep normatif!
- 5) Apa yang dimaksud dengan istilah *underdevelopment* (kurangnya pembangunan)? Berikan contoh-contohnya!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal latihan di atas, Anda dapat mempelajari kembali Kegiatan Belajar 2, khususnya materi yang membahas tentang:

1. Definisi atau pengertian dari pembangunan dan pertumbuhan, serta persamaan dan perbedaan prinsip di antara kedua konsep tersebut.
2. Teori-teori ekonomi pembangunan dan pertumbuhan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
3. Karakteristik dan implementasi konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
4. Perbedaan aplikasi pendekatan pembangunan dan pertumbuhan di negara-negara dunia ketiga.



RANGKUMAN

Konsep pertumbuhan ekonomi merujuk pada satu konsep pengukuran tunggal (*univariate*), misalnya satuan unit produksi atau pendapatan. Pengukuran-pengukuran pertumbuhan ekonomi biasanya dilakukan secara kuantitatif dengan nilai-nilai numeric yang pasti. Oleh karenanya, konsep pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang empiris kuantitatif dan dapat diuji secara empirik.

Konsep pembangunan merupakan konsep yang lebih luas. Dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan keharusan (Djojohadikusumo, 1994; Hess dan Ross, 1997). Namun, harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya sebagai salah satu komponen dalam pembangunan. Artinya, proses pembangunan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Bryant dan White (1985) menegaskan, bahwa pembangunan adalah suatu konsep normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut oleh Mahatma Gandhi sebagai “realisasi potensi manusia” (*human potential realization*). Pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak banyak menyelesaikan masalah dan kadangkala memiliki akibat yang tidak dikehendaki.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Parameter umum yang diukur dalam pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif dengan menggunakan nilai-nilai *numeric* adalah
 - A. pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja
 - B. produksi nasional atau pendapatan nasional
 - C. angkatan kerja dan investasi
 - D. tingkat kesejahteraan penduduk atau produktivitas

- 2) Dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang pasti. Pernyataan ini dikemukakan oleh
 - A. Djojohadikusumo (1994) dan Bryant and White (1985)
 - B. Michael Toddarro (1989) dan Djojohadikusumo (1994)
 - C. Hess and Ross (1997) dan Djojohadikusumo (1994)
 - D. Michael Toddarro (1989) dan Bryant and White (1985)

- 3) Pembangunan adalah sebuah konsep normatif, yang memberikan pilihan-pilihan kepada manusia untuk mencapai tujuan dalam rangka merealisasikan potensinya. Pernyataan ini dikemukakan oleh
 - A. Soekarno
 - B. Pandit J. Nehru
 - C. Joseph Broz Tito
 - D. Mahatma Gandhi

- 4) Secara ekstrem, yang menyatakan bahwa tanpa proses pembangunan dapat juga terjadi adanya pertumbuhan ekonomi adalah
 - A. Djojohadikusumo (1994)
 - B. Michael Toddarro (1989)
 - C. Hess dan Ross (1997)
 - D. Partadireja (1987)

- 5) Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, namun tidak terdapat adanya proses pembangunan dicontohkan oleh Djojohadikusumo (1994) pada kasus
 - A. negara dalam kondisi krisis moneter
 - B. negara dalam masa kolonisasi (penjajahan)
 - C. terjadinya kudeta dalam negara
 - D. adanya embargo dari luar negeri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Perkembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal Modul 1 telah dijelaskan tentang perkembangan teori ekonomi pembangunan, sebagai dasar pemahaman terhadap Modul ini. Namun demikian, dalam rangka untuk mendalami perkembangan pemikiran ekonomi pembangunan lebih lanjut, dalam Kegiatan Belajar 3 ini akan dijelaskan juga secara ringkas mengenai perkembangan teori pertumbuhan.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, teori pertumbuhan meliputi pokok-pokok pemikiran penting dari para tokoh ekonomi, baik pemikiran Neo-Keynes maupun Neo-Klasik. Kelompok pemikiran Neo-Keynes di antaranya adalah Teori Harrod dan Teori Domar, sedangkan dalam mazhab Neo-Klasik terdapat Teori Solow, Teori Kaldor dan Teori Kuznet. Selanjutnya secara singkat akan diuraikan pokok-pokok pikiran para tokoh tersebut dalam bahasan berikut ini².

A. MAZHAB PEMIKIRAN NEO-KEYNES

1. Teori Harrod

Roy F. Harrod mendapatkan pendidikan di Oxford University tentang filsafat, sejarah, dan sastra klasik. Walaupun Harrod merupakan profesor ekonomi dan secara institusional berpusat di Oxford, namun pemikirannya menginduk pada *Cambridge School of Economics* (Djojohadikusumo, 1994). Hal ini merupakan pengaruh langsung dari John Maynard Keynes sebagai pembimbingnya pada saat memperdalam ekonomi di universitas tersebut. **Harrod**, bersama **Joan Robinson** dan **R.F. Khan**, merupakan kelompok utama pendukung Neo-Keynes, setelah J.M. Keynes meninggal dunia. Dua karya Harrod yang mengemukakan teorinya secara fundamental adalah *An essay in Dynamic Theory* dalam *Economic Journal* 49, Maret 1939 dan *Toward a Dynamic Economics : Some Recent Development of Economic Theory and Their Application To Policy*, 1948.

² Untuk pembahasan lebih rinci disarankan untuk mempelajari, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Djojohadikusumo, 1994 dan *Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Djojohadikusumo, 1980.

Teori pertumbuhan Harrod menganalisis tentang stabilitas pertumbuhan ekonomi pada kondisi ekuilibrium. Hasil analisis Harrod menguraikan tentang teorema instabilitas (*instability theorem*). Inti dari teorema ini adalah bahwa dalam proses pertumbuhan secara *inheren* mengandung unsur ketidakstabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keseimbangan (ekuilibrium). Dalam mengawali teorinya, Harrod membedakan laju pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi ekuilibrium atau keseimbangan yang stabil terdiri dari:

- a. laju pertumbuhan *the warranted rate of growth*, dan
- b. *the natural rate of growth*.

Menurut Harrod, yang dimaksudkan dengan *the warranted rate of growth* adalah laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang memadai dari sudut pandang para investor atau pengusaha. Pada kondisi ini, para pengusaha atau investor dengan sendirinya akan menanamkan investasi secara terus-menerus selama mereka menganggap laju pertumbuhan memenuhi harapannya (ekspektasi) sehingga dengan demikian, laju pertumbuhan selalu terjamin (*warranted*) tersebut akan terpenuhi. Sementara itu, *the natural rate of growth* dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terjadi karena adanya kondisi dasar (*fundamental condition*) dari perekonomian, yang dipengaruhi oleh tenaga kerja, baik oleh adanya penambahan maupun adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai respons positif kemajuan teknologi.

Berdasar pada pembedaan atas dua jenis pertumbuhan tersebut, teori Harrod menyatakan bahwa pertumbuhan yang terus-menerus akan terjadi apabila laju pertumbuhan *the warranted* maupun *natural* bisa tercapai. Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa *warranted rate of growth* identik dengan *natural rate of growth* atau dalam pengertian ini adalah laju pertumbuhan yang memadai tersebut lah yang mendorong pengusaha atau investor melakukan investasi merupakan laju pertumbuhan alamiah. Dengan demikian, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *natural rate of growth* harus dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang menarik investasi dari para investor.

Pada kenyataannya, kedua jenis laju pertumbuhan tersebut jarang sekali terjadi secara bersamaan. Penyebabnya adalah bahwa faktor yang mempengaruhi keduanya berlainan dan bebas satu sama lain. Oleh karenanya, selalu akan terjadi gangguan untuk mengarah pada instabilitas ekuilibrium. Kondisi inilah yang menjadi salah satu ciri pokok dari

pertumbuhan. Oleh sebab itu, teori Harrod menyarankan bahwa “jika dikehendaki adanya ekuilibrium dalam proses pertumbuhan maka diperlukan intervensi kebijakan untuk mengatasi gangguan ketidakstabilan dan penyimpangan yang merupakan ciri pokok dari pertumbuhan itu sendiri”.

2. Teori Domar

Teori ini dikembangkan oleh **Evsey D. Domar**. Gagasan Domar tentang pertumbuhan dituangkan dalam tulisannya yang berjudul *Capital Expansion, Rate of Growth and Employment*, *Econometrica*, 1946 dan *Essays in The Theory of Economic Growth*, 1957. Walaupun dikembangkan secara terpisah dan diterbitkan 7 tahun kemudian setelah teori Harrod, hasil kesimpulan teori Domar sama dengan Teori Harrod.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa walaupun kedua teori tersebut secara substantif adalah sama, namun pendekatan yang diterapkan berbeda. Teori Domar didasarkan pada konsep *investment multiplier*, di mana teori tersebut dinyatakan bahwa pertumbuhan permintaan adalah sama dengan penambahan investasi (ΔI) dikalikan *multiplier*nya ($1/s$). Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi adalah sama dengan investasi (I) dibagi dengan *capital-output ratio* (k). Apabila diasumsikan bahwa laju pertumbuhan pada permintaan secara efektif langsung berimplikasi pada pertumbuhan kapasitas produksi maka pertumbuhan permintaan sama dengan pertumbuhan kapasitas produksi, dan dinyatakan $\Delta I/I = s/k$.

Kondisi pertumbuhan pada persamaan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang kritis (*critical rate of growth*). Apabila dibandingkan pada teori Harrod maka pertumbuhan ini analog dengan *the warranted rate of growth*. Pada kondisi ekuilibrium maka persamaan tersebut selalu akan seimbang. Namun, apabila laju investasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan pada keseimbangan tersebut akan mendorong ketidakseimbangan. Sebabnya adalah bahwa hal tersebut akan mendorong nisbah $\Delta I/I$ (pertumbuhan permintaan) lebih besar dari s/k (pertumbuhan kapasitas produksi), dan menjadikan gangguan keseimbangan atau ekuilibrium.

Teori Domar menyimpulkan bahwa jika terdapat gangguan yang mendorong penyimpangan pada laju pertumbuhan investasi dari laju kritisnya (s/k) maka penyimpangan tersebut akan cenderung terjadi secara terus-menerus sehingga diperlukan adanya intervensi kebijakan untuk mengembalikan proses penyimpangan mengarah kembali pada kondisi keseimbangan.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori Domar sama dengan pendahulunya, yaitu teori Harrod sehingga kedua teori tersebut sering digabung menjadi teori Harrod-Domar. Teori tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang diambil adalah bagaimana mendorong terjadinya tabungan dan atau menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan produksi dengan menggunakan *input* yang lebih rendah (*capital-output ratio* lebih rendah).

Kritik utama terhadap teori ini, jika dikaitkan dengan kondisi negara berkembang adalah bahwa tabungan menjadi satu hal yang sulit sekali dilakukan. Hal ini karena pendapatan masyarakat negara-negara berkembang yang cenderung rendah. Apabila pinjaman asing dilakukan untuk meningkatkan investasi, maka akan terjadi masalah dalam pembayarannya dan merupakan masalah tersendiri bagi negara-negara berkembang.

B. MAZHAB TEORI NEO-KLASIK

1. Teori Solow

Robert M. Solow, menyampaikan gagasannya secara terperinci dalam dua tulisannya, yaitu *Contribution to the Theory of Economic Growth*, *Quarterly Journal of Economics*, 1956 dan *Growth Theory Exposition*, 1970 (Djojohadikusumo, 1994). Tulisannya tersebut kemudian dikenal dengan Teori Solow. Teori ini bertitik tolak pada asumsi-asumsi dasar pemikiran Teori Klasik, seperti pasar persaingan sempurna, adanya mobilitas sarana produksi, substitusi antarfaktor produksi serta fungsi produksi yang *constant return of scale* (selalu menghasilkan nisbah *input* faktor dan *output* yang sama/seragam). Dengan asumsi tersebut, Solow melihat bahwa asumsi dasar dalam teori Harrod yang menyatakan bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh tenaga kerja dengan asumsi tingkat upah dan tingkat bunga yang tetap selama dalam waktu analisis, tidak lah berdasar. Hal ini menurut Solow karena terdapat kemungkinan adanya perubahan pada tingkat bunga maupun tingkat upah.

Hal lain yang dikemukakan oleh Solow adalah bahwa terjadi kemungkinan substitusi antarfaktor produksi karena adanya fleksibilitas harga produksi. Oleh karenanya, apabila investasi bertambah (*input* modal meningkat) maka harga tenaga kerja (tingkat upah) meningkat secara relatif dibandingkan dengan harga kapital (tingkat bunga). Logika sederhananya adalah bahwa jika kapital semakin banyak sehingga harga riil atau dalam hal

tenaga kerja maka upah akan semakin tinggi (meningkat), dan apabila modal semakin langka, akan berakibat tingkat bunga menjadi lebih rendah.

Dengan logika yang sama, apabila *input* tenaga kerja bertambah maka yang terjadi adalah sebaliknya. Adanya proses substitusi yang didorong oleh perubahan harga relatif akan mendorong faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Selanjutnya, hasil interaksi tersebut kemudian saling membatasi dan menggiring penyimpangan kembali ke arah ekuilibrium dengan sendirinya. Oleh karena itu, gagasan Solow merupakan bantahan terhadap instabilitas teorema dalam Teori Harod.

Walaupun secara ilmiah (*scientific*) dalam konteks konsistensi logikanya sangat baik, namun sejumlah asumsi yang mendasarinya sangat jauh dari realitas negara-negara berkembang (Djojohadikusumo, 1994). Oleh sebab itu, teori ini sulit diterapkan untuk menjelaskan fenomena negara-negara berkembang. Terlepas dari kelemahan tersebut, pendekatan konsistensi dan semangat gagasan Solow sangat berguna untuk menjelaskan fenomena perekonomian negara-negara berkembang.

2. Teori Kaldor

Walaupun masih merujuk pada pendekatan asumsi-asumsi mazhab ekonomi Klasik sehingga dikelompokkan dalam kelompok Neo-klasik, analisis **Nicholas Kaldor** sebenarnya mencakup pada analisis yang lebih luas. Ia pun tidak membantah aplikasi model-model makro ekonomi dan ekonometrik yang rumit. Namun, Kaldor menyarankan untuk melakukan seleksi dan penyaringan fenomena ekonomi yang paling relevan untuk dianalisis.

Menurut pandangan Kaldor tentang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, perlu dibedakan antara pertumbuhan ekonomi industri manufaktur dan industri primer. Hal ini mengingat bahwa karakteristik keduanya berbeda. Pada industri manufaktur, proses produksi telah berlangsung pada kondisi tingkat *output* yang semakin lebih tinggi dari tingkat pertambahan *input* yang digunakan (*increasing returns to scale*) sehingga lebih efisien. Oleh karena itu, perekonomian negara-negara industri telah terjadi kenaikan hasil (*increasing returns*) baik pada level makro (keseluruhan masyarakat) maupun mikro (level pengusaha).

Pada kondisi perekonomian manufaktur, *increasing returns* dan kemajuan teknologi saling mengait (sebagai fungsi dari sistem produksi) yang diterapkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Oleh karena itu, semakin

jauh proses penelitian berjalan, teknologi yang diaplikasikan biasanya akan semakin efisien dan tingkat produksi akan semakin tinggi. Ini berarti bahwa *increasing returns* bukan hanya merupakan fungsi dari skala produksi, melainkan juga merupakan fungsi dari produksi, yang dihasilkan sejalan dengan waktu.

Demikian pula tentang akumulasi modal. Pertumbuhan industri dalam jangka panjang ditandai dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Akan tetapi, pertumbuhan industri tersebut memerlukan dukungan investasi yang terus-menerus sehingga semakin besar nilainya, modal per tenaga kerja (*capital-labor ratio*) mengalami peningkatan. Sementara itu, hubungan antara kapital dengan *output* yang dihasilkan (*capital-output ratio*) tidak begitu menonjol. Oleh karena itu, Kaldor menyatakan bahwa investasi sebenarnya bukan sebab bagi pertumbuhan produksi, tetapi pertumbuhanlah yang mendorong investasi.

Pada industri komoditi primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan tambang), berlangsung *decreasing returns* atau tingkat pengembalian per unit faktor produksi menurun secara relatif terhadap biaya. Menurut Kaldor, *decreasing returns* dapat dicegah/ dihambat dengan aplikasi teknologi. Namun, terdapat satu kesulitan untuk menerapkan solusi yang ditawarkan oleh Kaldor, yaitu bahwa dalam industri primer teknologi bersifat eksogen.

Berdasarkan asumsi tentang adanya ekonomi tertutup (*closed economy*) dalam jangka panjang maka pertumbuhan industri sektor primer menjadi kendala bagi pertumbuhan industri sektor manufaktur. Alasannya adalah, dalam jangka panjang, permintaan dari sektor industri primer akan menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan sektor industri manufaktur. Keadaan ini kemudian akan mendorong sektor industri manufaktur untuk mencari alternatif permintaan pada daerah lain sehingga memungkinkan adanya transaksi perekonomian terbuka (terjadinya transaksi perdagangan dengan wilayah luar negeri). Industrialisasi, dianggap menjadi faktor pendorong ke arah perekonomian tertutup menjadi terbuka.

Menurut Djojohadikusumo (1994), kelebihan dari gagasan Kaldor dibanding pendahulunya adalah dalam hal pengikutsertaan unsur spasial serta introduksi konsep *cumulative causation*, yaitu hal-hal atau sebab-sebab yang mendorong peningkatan kumulatif. Hal ini dipandang sebagai kemajuan karena dapat menjelaskan pertumbuhan perekonomian kawasan atau region. Suatu kawasan yang mengalami *increasing returns to scale* akan mempunyai produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, dan membutuhkan biaya tenaga

kerja per *output* produksi yang lebih rendah. Dengan begitu, kawasan tersebut akan mempunyai tingkat daya saing yang lebih tinggi dan terus berkembang. Fenomena sebaliknya terjadi pada daerah industri yang menunjukkan *decreasing returns to scale*. Untuk meredakan kesenjangan, daerah industri yang *increasing return to scale* memfungsikan diri sebagai pasar produk bagi daerah *decreasing return to scale* dan arah sebaliknya pada proses berikutnya.

3. Pendekatan Kuznet

Simon Kuznet, sangat berjasa dalam analisis kerangka pendapatan nasional dan analisis perbandingan pertumbuhan ekonomi. Sumbangan Kuznet juga besar dalam pengembangan paradigma analisis ekonomi. Pendekatan kuantitatif Kuznet tidak dikembangkan hanya berdasar model makro-ekonometris yang sempit (Djojohadikusumo, 1994), tetapi melibatkan disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, sejarah, dan ilmu politik, untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif. Meskipun demikian, Kuznet tidak menolak model ekonomi; kerangka teori ekonomi tetap menjadi acuan utama dalam setiap analisisnya.

Seperti halnya Kaldor, Kuznet juga menganalisis pertumbuhan ekonomi primer dan manufaktur (*industrialis*). Penelitian empirisnya diawali dengan melihat wilayah Eropa Barat, kemudian dikembangkan pada wilayah Amerika Utara, Australia, Selandia Baru dan Jepang, dalam bingkai waktu yang berbeda. Dalam hal ini, Kuznet menggunakan analisis deret waktu (*time series analysis*) yang mencakup kurun waktu abad ke-18 sampai ke-19 dan ke-20. Kurun waktu tersebut ditetapkan sebagai era pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan per kapita penduduk mencapai rata-rata 15% setiap sepuluh tahun. Sebelum era tersebut, ekonomi negara-negara tersebut masih bertumpu pada sektor primer. Pengaruh teknologi, inovasi dan perbaikan infrastruktur mendorong diversifikasi perekonomian sehingga mengalami pertumbuhan lebih cepat. Faktor penemuan teknologi komunikasi juga dianalisis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu, sektor primer semakin ditinggalkan penduduk di negara-negara tersebut. Perkembangan teknologi telah memungkinkan berkembangnya komunikasi antarmasyarakat termasuk lintas negara yang pada akhirnya semakin mendorong pertumbuhan ekonomi secara global.

Analisis Kaldor dan Kuznet, menunjukkan semakin banyaknya telaahan yang lebih terbuka pada pemikiran Neo-Klasik, tidak hanya berfokus pada

model yang kaku. Hal ini terbukti telah mempercepat terciptanya sebuah *frame work* analisis ekonomi pembangunan secara keseluruhan.

C. BEBERAPA KONSEP DASAR PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam analisis teori pertumbuhan maupun analisis ekonomi pembangunan, terdapat sejumlah konsep penting yang perlu dipahami. Hal ini diperlukan untuk dapat memahami proses dalam perekonomian masyarakat. Dalam kepustakaan ekonomi secara umum, komponen dalam perekonomian dapat dikelompokkan menjadi empat sektor utama, yaitu rumah tangga, perusahaan (swasta, pemerintah maupun asing) serta pemerintah dan luar negeri (ekspor dan impor) (Partadireja, 1985; Djojohadikusumo, 1994; Lipsay *et al.* 1993; Galbraith dan Darity, 1994). Namun demikian, untuk keperluan penyederhanaan ilustrasi, disederhanakan komponen perekonomian masyarakat menjadi dua sektor saja, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

Seperti kita ketahui bahwa pada perekonomian di masyarakat terjadi suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan adanya *input* berupa barang maupun jasa lain yang sangat beragam yang berasal dari sektor rumah tangga. Untuk itu, sektor rumah tangga akan mendapatkan imbalan dari perusahaan atas barang dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dalam transaksi berikutnya, untuk setiap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut oleh pengguna sebagai konsumen dibeli dengan harga tertentu untuk setiap jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Demikian proses ini berputar terus-menerus dalam mekanisme perekonomian masyarakat.

Berdasar ilustrasi tersebut di atas, terdapat dua alur pokok, yaitu alur barang dan jasa, serta alur uang. Alur barang dan jasa terjadi dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan (sebagai *input* produksi), serta dari perusahaan ke sektor rumah tangga (sebagai produk yang dikonsumsi). Demikian pula alur uang meliputi alur uang dari perusahaan ke rumah tangga sebagai balas jasa *input* dan alur uang dari sektor rumah tangga ke perusahaan sebagai pengeluaran belanja rumah tangga.

Namun demikian, dua alur pokok tersebut dapat juga dikelompokkan menjadi dua kelompok alur yang lain, yaitu proses untuk menghasilkan

output (barang dan jasa) dan proses setelah terjadi produksi (pasca produksi). Pada proses menghasilkan produk maka terjadi proses penyerahan *input* dari masyarakat ke perusahaan serta imbalannya atau balas jasa dari perusahaan ke masyarakat. Sementara setelah produk dihasilkan, terjadi aliran konsumsi *output* dari perusahaan ke rumah tangga dan sebagai konsekuensinya rumah tangga mengeluarkan biaya belanja yang diterima oleh perusahaan.

Perlu diperhatikan bahwa dalam keadaan keseimbangan perekonomian untuk dua sektor tersebut di atas, jumlah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada rumah tangga adalah sama dengan nilai barang dan jasa yang diserahkan rumah tangga kepada perusahaan. Sementara itu, jumlah nilai pengeluaran rumah tangga untuk membeli *output* perusahaan adalah sama dengan nilai uang yang diterima oleh rumah tangga atas pemakaian *input* produksi oleh perusahaan seperti diuraikan di atas. Jumlah pengeluaran tersebut juga sama dengan nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan perusahaan. Demikian perputaran ini berjalan secara terus-menerus membentuk suatu siklus ekonomi.

Secara sederhana, untuk kasus dua sektor tersebut, apabila sektor rumah tangga dan sektor perusahaan mewakili perekonomian makro nasional maka jumlah aliran produksi (barang dan jasa) dari perusahaan ke rumah tangga disebut sebagai produk nasional. Sementara aliran balas jasa atas penggunaan *input* produksi dari perusahaan ke rumah tangga disebut sebagai pendapatan nasional. Sebaliknya, aliran jumlah pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan disebut sebagai pengeluaran atau belanja nasional. Ilustrasi dari dua sektor tersebut dapat dikembangkan lebih jauh untuk tiga dan empat sektor, dengan membuat skema perputaran perekonomian seperti yang terjadi pada dua sektor tersebut.

Setelah dapat memahami kasus perekonomian sederhana di atas maka kemudian dapat dikembangkan lebih mendalam pada konsep-konsep tersebut, seperti diuraikan sebagai berikut.

Konsep pendapatan nasional selalu berhubungan dengan produk nasional karena satu dan yang lainnya memang ekuivalen terhadap suatu *output* (produksi) yang dihasilkan secara nasional. Perbedaannya adalah, dalam cara menghitung terhadap *output* yang dihasilkan tersebut, di mana menunjukkan asal nilai tersebut. Nilai atas produk nasional tersebut dapat dianggap sebagai pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode atau pendekatan (Partadireja, 1985), yaitu:

1. metode produksi (*production approach*),

2. metode pendapatan (*income approach*), dan
3. metode pengeluaran (*expenditure approach*).

Berdasarkan metode produksi maka pendapatan nasional adalah nilai produksi barang dan jasa secara nasional pada periode tertentu. Untuk Indonesia, biasanya diukur berdasar satu tahun kalender (Partadireja, 1985 dan Djojohadikusumo, 1994). Perlu diperhatikan bahwa dalam satu proses produksi diperlukan adanya *input* produksi sehingga dalam nilai akhir sebuah produk sebenarnya masih terkandung jumlah biaya, yang mencerminkan banyaknya *input* yang dipakai untuk menghasilkan *output* tersebut. *Input* tersebut juga merupakan nilai akhir dari proses produksi sebelumnya. Oleh karena itu apabila perhitungan mencakup seluruh jenis dan tingkatan produksi, maka perlu dilakukan perhitungan secara detail sehingga menghindari adanya perhitungan ganda (*double accounting*). Untuk itu, dalam perhitungan yang dimasukkan adalah jumlah nilai tambah, yaitu selisih antara nilai produk akhir dikurangi nilai *input* produksinya, termasuk di dalamnya adalah keuntungan sebagai nilai dari *entrepreneurship*.

Oleh karena pada dasarnya yang dihitung adalah nilai produksi nasional maka pendapatan nasional ini disebut juga sebagai Produk Nasional (Djojohadikusumo, 1994). Total dari seluruh nilai tambah sektor produktif di masyarakat dalam perekonomian Indonesia, kemudian disebut sebagai Produksi Nasional Bruto (*Gross National Product* atau GNP). Disebut *brutto* atau *gross*, sebab masih dimasukkan nilai penyusutan yang belum dikeluarkan dari nilai barang-barang modal. Oleh karena itu, GNP juga didefinisikan sebagai semua penjumlahan nilai dari barang dan jasa akhir (dikonsumsi oleh konsumen akhir) yang dihasilkan oleh warga negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, bila nilai penyusutan telah dikeluarkan dari barang modal maka hasil perhitungan disebut Produk Nasional Bersih (*Net National Income/NNI*).

Dalam pengertian ini maka GNP Indonesia, meliputi nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebaliknya, nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak diperhitungkan dalam GNP. Apabila yang dihitung adalah seluruh nilai tambah atau produk akhir dari seluruh penduduk di Indonesia (termasuk produksi warga negara asing yang tinggal di Indonesia), disebut sebagai Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product /GDP*). Selisih antara GDP dan GNP ini menggambarkan besarnya nilai pembayaran ke luar negeri atau

sebaliknya pembayaran dari luar negeri. Untuk kasus Indonesia maka GDP masih lebih besar dari GNP sehingga masih terjadi pembayaran ke luar negeri, sebagai balas jasa atas pemakaian barang modal (investasi) yang sebagian besar merupakan penanaman modal asing di Indonesia.

Untuk mendapatkan satuan (unit) nilai, jumlah besaran (*magnitude*) dari masing-masing produk dikalikan dengan satuan harganya baik harga riil maupun harga aktual. Harga riil sebagai harga yang dipakai bukan harga pada tahun yang bersangkutan (harga aktual), tetapi harga yang mengacu ke tahun tertentu sebagai barometer atau yang disebut tahun dasar. Penilaian produk nasional yang dihasilkan pada tahun-tahun selain tahun dasar selalu dikoreksi dengan harga standar tahun dasar tersebut. Oleh karena harga tahun dasar bersifat konstan, produk nasional dengan harga ril sering pula disebut sebagai produk nasional dengan harga konstan tahun tertentu. Sebaliknya, produk nasional yang menggunakan harga aktual pada tahun bersangkutan disebut dengan produk nasional dengan harga tahun berlaku.

Berbeda dengan perhitungan dengan metode produksi, pendekatan kedua didasarkan pada perhitungan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan pendapatan, yaitu dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi. Pendapatan ini dapat berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Hasil penjumlahan tersebut dinyatakan dalam Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income/GNI*) dan Pendapatan Domestik Bruto (*Gross Domestic Income/GDI*) serta *National Income* (NI). Seperti pendefinisian GNP dan GDIP maka GNI mencakup pendapatan warga negara Indonesia di luar dan di dalam negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan warga negara asing di Indonesia. Sebaliknya GDI adalah seluruh pendapatan penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia, termasuk warga negara asing. Sedangkan NI adalah GNI setelah dikurangi penyusutan.

Pendekatan *ketiga* adalah perhitungan pendapatan nasional berdasarkan metode pengeluaran. Metode ini menghitung seluruh pengeluaran lapisan masyarakat, yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pemerintah (G), investasi (I), serta ekspor (X) dikurangi impor (I). Total dari seluruh pengeluaran tersebut mencerminkan nilai besarnya pendapatan nasional.

Hasil dari ketiga model perhitungan tersebut sudah seharusnya mendapatkan nilai yang sama, sebab pada dasarnya menghitung nilai atau sesuatu yang sama. Namun demikian, dalam kasus Indonesia, perhitungan

umumnya masih dilakukan berdasar metode produksi (Partadireja, 1985). Hal ini semata-mata karena faktor teknis, yaitu masalah ketersediaan data yang memadai. Hal yang penting adalah bahwa sesuai dengan penjelasan di atas maka istilah pendapatan nasional dan produk nasional dapat dipertukarkan sehingga istilah GNP dapat dipertukarkan dengan GNI dan sebaliknya GDP dengan GDI. Walaupun pada umumnya istilah GNP lebih sering digunakan oleh khalayak.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Kegiatan Belajar 3 diatas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan intisari dari Teori Harrod sehingga ia dikategorikan sebagai penganut Mazhab Pemikiran Neo-Keynes!
- 2) Apa perbedaan mendasar pendekatan Teori Harrod dan Teori Domar dalam gagasannya tentang pertumbuhan ekonomi?
- 3) Sebutkan beberapa ciri khas dari pemikiran Mazhab Teori Neo-Klasik tentang pertumbuhan ekonomi yang membedakannya dengan Mazhab Neo-Keynes!
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)!
- 5) Jelaskan perbedaan perhitungan GNP antara metode produksi (*production approach*) dengan metode pengeluaran (*expenditure approach*)!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal latihan tersebut di atas, pelajari kembali Kegiatan Belajar 3. Khususnya pada materi-materi yang membahas tentang:

1. Mazhab Pemikiran Neo-Keynes yang didukung oleh teori-teori yang berasal dari para ahli perekonomian di masanya, seperti Teori Harrod dan Teori Domar, serta intisari pemikiran yang membedakannya masing-masing.

2. Mazhab Pemikiran Neo-Klasik, khususnya ciri-ciri khas teori pemikiran dari para pendukungnya, seperti Teori Solow, Teori Kaldor, dan Pendekatan Kuznet.
3. Beberapa konsep dasar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
4. Konsep-konsep pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode produksi (*production approach*), metode pendapatan (*income approach*), dan metode pengeluaran (*expenditure approach*).



RANGKUMAN

Teori ekonomi pembangunan masih bersifat relatif baru dibandingkan dengan teori-teori dalam arus utama (*mainstream*) pemikiran ekonomi yang saat ini berkembang. Awal perkembangan teori ini diawali oleh ketertarikan sebagian ekonom pada fenomena-fenomena di negara-negara berkembang yang tidak menunjukkan gejala-gejala pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan di negara-negara maju, ketika dilakukan intervensi kebijakan ekonomi yang didasarkan pada teori arus utama (*mainstream*) ekonomi.

Hal yang mendasar adalah bahwa teori ekonomi dalam arus utama pemikiran ekonomi, berorientasi sangat kuat pada pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada asumsi sistem dan kelembagaan ekonomi masyarakat yang telah mapan. Teori pertumbuhan ekonomi didasarkan pada hubungan yang seimbang antara tabungan, investasi dan pendapatan. Dengan demikian, titik tumpu analisis teori pertumbuhan adalah ketiga hal tersebut.

Perangkat analisis dalam ekonomi pembangunan pada umumnya masih menggunakan alat analisis ekonomi dalam arus utama pemikiran ekonomi, serta ilmu-ilmu lain yang terkait. Oleh karena itu, untuk dapat memahami dengan baik maka pengetahuan konsep-konsep dasar analisis ekonomi perlu untuk dipelajari dengan baik. Seperti diperlukan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar pendapatan nasional, seperti GNP, GDP, NNP, GNI, GDI, dan NI.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Inti dari “*instability theorem*” Harrod adalah
 - A. proses pembangunan secara koheren mengandung unsur ketidakstabilan yang pada waktu tertentu dapat mengganggu *equilibrium*
 - B. laju pertumbuhan memiliki ketidakstabilan dalam kondisi *equilibrium*
 - C. proses pertumbuhan secara inheren mengandung ketidakstabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu *equilibrium*
 - D. laju pembangunan memiliki ketidakstabilan dalam kondisi *equilibrium*

- 2) Inti gagasan Solow yang merupakan bantahan terhadap teori Harold adalah
 - A. adanya interaksi antara faktor-faktor tenaga kerja dan perubahan dari tingkat upah, kemudian saling membatasi akan mendorong faktor tersebut mengalami penyimpangan kembali ke arah *equilibrium*
 - B. proses substitusi antarfaktor ekonomi tenaga kerja dan tingkat upah tidak formal mengalami ketidakstabilan
 - C. interaksi faktor-faktor produksi akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan tingkat upah yang pada akhirnya menuju ke arah *equilibrium*
 - D. instabilitas itu sendiri terjadi bukan karena adanya permintaan tenaga kerja, namun lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah dan pasar kerja

- 3) Teori Solow, yang menyatakan walaupun secara ilmiah dalam konteks logika sangat baik, namun sejumlah asumsi yang mendasarinya sangat jauh dari realitas negara-negara berkembang adalah
 - A. Djojohadikusumo (1994)
 - B. Partadireja (1985)
 - C. Kuznet (1958)
 - D. Galbraith dan Darity (1994)

- 4) Kelebihan teori Kaldor, menyatakan bahwa dibanding pendahulunya adalah dalam hal pengikutsertaan unsur spasial serta introduksi konsep “*cumulative caution*” adalah
- Djojohadikusumo (1994)
 - Partadireja (1985)
 - Kuznet (1958)
 - Galbraith dan Darity (1994)
- 5) Orang yang berjasa dalam analisis kerangka pendapatan nasional dan analisis perbandingan pertumbuhan ekonomi adalah
- Djojohadikusumo
 - Partadireja
 - Kuznet
 - Galbraith dan Darity

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) A
- 3) B
- 4) A
- 5) B

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) C
- 3) D
- 4) A
- 5) B

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) A
- 4) A
- 5) C

Daftar Pustaka

- Blackman, A., M. Mathis and P. Nelson. (2001). *The Greening of Development Economics: A Survey*. (Discussion Paper). Washington: Resource for the Future.
- Bryant, W. dan White, L.G. (1989). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Galbraith, J.K and W. Darity Jr. *Macroeconomics*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hess, P and C. Ross. (1997). *Economic Development Theories, Evidence and Policies*. New York: The Dryden Press.
- Lipsey, R.G, P.N. Courant, D.D. Purvis and P.O. Steiner. *Economics*. Tenth Edition. New York: HarperCollin College Publisher.
- Nijkam, P. (1980). *Environmental Policy Analysis, Operational Methods and Models*. New York: John Wiley & Sons.
- Partadireja, A. (1985). *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta: LP3ES.